



**ANALISIS PENERAPAN PSAK 46 PADA
PT METROPOLITAN LAND TBK
PERIODE 2015-2020**

Skripsi

Dibuat Oleh :
Dinny Dwi Ismutria Pratiwi
022115235

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2022



**ANALISIS PENERAPAN PSAK 46 PADA
PT METROPOLITAN LAND TBK
PERIODE 2015-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Manajemen
Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, AK., MM.,CA.)



Ketua Program Studi Manajemen
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,
CCSA, CA, CSEP, QIA)

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 46 PADA
PT METROPOLITAN LAND TBK
PERIODE 2015-2020**

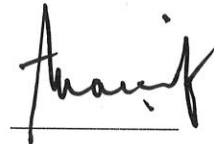
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari : Jum'at 1 Juli 2022

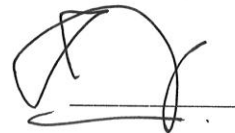
Dinny Dwi Ismutria Pratiwi
022115235

Disetujui,

Ketua Penguji
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,
CCSA, CA, CSEP, QIA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, AK., M.M., C.A)



Anggota Komisi Pembimbing
(Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M., Si., CMA., CAPM)



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinny Dwi Ismutria Pratiwi
NPM : 022115235
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK 46 Pada PT Metropolitan LAND TBK
Periode 2015-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi/Tesis Desertasi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2022



Dinny Dwi Ismutria Pratiwi
022115235

Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2022
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Dinny Dwi Ismutria Pratiwi. 022115235. Analisis Penerapan PSAK 46 pada PT Metropolitan Land Tbk Periode 2015-2020. Di bawah Bimbingan: Prof. Dr.Yohanes Indrayono dan Dr.Retno Martanti Endah Lestari 2022.

Negara Indonesia seringkali dihadapkan dengan permasalahan dan persoalan khususnya dalam bidang ekonomi, yang terkadang berpengaruh terhadap jalanya pembangunan nasional. Oleh karena itu, demi kelancaran pembangunan nasional begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan negara khususnya yang berasal dari sektor pajak. Setiap entitas memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh entitas dikenakan pajak setelah dikurang dengan biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan. Penghasilan tersebut kemudian akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atas seluruh penghasilannya.

Penelitian ini memiliki tujuan (1) Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah laporan keuangan PT Metropolitan Land Tbk telah sesuai dengan PSAK 46. (2) Bertujuan untuk menganalisis PSAK 46 pada perusahaan PT Metropolitan Land Tbk apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan. (3) Untuk mengetahui analisis PSAK 46 atas laporan keuangan pada PT Metropolitan Land Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2020.

Penelitian studi kasus mengenai penerapan PSAK 46 ini dilakukan pada salah satu perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Metropolitan Land Tbk dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif non statistik yaitu metode analisis yang digunakan untuk menjelaskan variabel, indikator, dan ukuran tentang penerapan PSAK 46 pada laporan keuangan PT Metropolitan Land Tbk dan membandingkan penerapan PSAK 46.

Berdasarkan dalam PT Metropolitan Land Tbk selalu mengalami kerugian di tahun 2015-2016, sehingga tidak dapat melakukan kompensasi kerugiannya. Peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyajian pajak penghasilan PSAK 46 pada laporan keuangan. dari penjelasan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat pembahasan topik penelitian ini diberi judul **“Analisis Penerapan PSAK 46 Pada PT Metropolitan Land Tbk Periode 2015-2020”**.

Peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk lebih menggali informasi mengenai PSAK 46 dengan segala amandemennya dalam perkembangan PSAK tahun terbaru, dan informasi perusahaan yang lebih detail mengenai rincian laporan keuangan melalui data primer untuk menguatkan hasil penelitian.

Kata Kunci: PSAK 46, Laporan Keuangan Konsolidasian, Pajak Tangguhan

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 46 Pada PT Metropolitan Land Tbk Periode 2015-2020”

Tidak lupa penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih yang sangat berarti atas doa, dukungan, semangat, dan motivasi dari berbagai pihak, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, dan kelancaran yang tak terhingga.
2. Kedua Orang Tua tercinta yang begitu sangat saya sayangi lebih-lebih pada diri saya sendiri, (Bapak Isnu Trijayanto (Alm) dan Ibu Wiwiek Isnowati) atas doa yang tidak pernah terputus, semangat, motivasi dan segala dukungan baik secara moril maupun materil yang tidak dapat dituliskan satu persatu.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, AK., MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Prof. Dr. Yohanes Indrayono, AK., M.M., C.A Selaku ketua komisi yang telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, SE., MSi., CMA., CAPM Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi FE-Unpak yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, Selaku anggota komisi pembimbing yang telah mengarahkan serta memberikan saran selama penyusunan demi perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat bagi saya.
8. Seluruh staff Tata Usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
9. Kakak, Adik tercinta dan tersayang mba Asti Ismutia Pratiwi dan M.Risky Ismu Trinovianto yang selalu mendukung saya, membantu saya serta sebagai motivasi saya untuk selalu mengerjakan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya Geng Julid (Sandra, Dinny, Nadya) yang sudah saya anggap jadi keluarga kedua saya.
11. Teman-teman seperjuangan saya Ayu, Erni, Nilla, Novi, Donal, Melki, Ageng, Ningrum, Hendy, Lany, Tina, Anada, Yusuf, Oka, Tri Handoko, Ageng yang berjuang bersama dan yang sudah memberikan pahit manisnya selama duduk dibangku perkuliahan, dan Ibu Keni catur yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.

12. Pendukung pengerjaan skripsi saya ka Sella, Teh Anisa dan teman-teman satu bimbingan bapak Yohanes dan Ibu Retno yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.
13. Teman-teman kelas F Akuntansi 2015, dan semua pihak yang sudah membantu, mendoakan dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan bentuk saran dan masukan yang sifatnya membangun demi perbaikan penelitian yang penulis lakukan selanjutnya.

Bogor,
juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
HAK CIPTA	iv
ASBTRAK	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Perumusan Masalah	5
1.2.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Maksud Penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Praktis	6
1.4.2 Kegunaan Akademis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.2 Pajak Penghasilan	9
2.2.1 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	10
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	12
2.2.3 Fungsi Pajak	14
2.2.4 Jenis Pajak	14
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan.....	16
2.2.6 Undang-Undang yang Mengatur Pajak Penghasilan	19
2.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK No. 46	19
2.3.1 Pengertian PSAK No. 46	19
2.3.2 Tujuan PSAK No. 46	20
2.3.3 Adopsi IFRS pada PSAK 46	20
2.3.4 Pajak Kini dan Pajak Tangguhan	21
2.4 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer	22
2.4.1 Perbedaan Permanen	22
2.4.2 Perbedaan Temporer	23

2.4.3	Perbedaan Temporer Kena Pajak	23
2.4.4	Perbedaan Temporer Dapat Dikurangkan.....	24
2.5	Laporan Keuangan Konsolidasian	24
2.6	Beban Pajak Penghasilan	24
2.7	Penyajian Laporan Keuangan	25
2.7.1	Pengertian Laporan Keuangan	25
2.7.2	Pengertian Laporan Komersial	25
2.7.3	Laporan Keuangan Fiskal	26
2.7.4	Tujuan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	26
2.7.5	Fungsi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	26
2.7.6	Hubungan PSAK No. 46 dengan Peraturan Perpajakan	26
2.8	Penelitian Terdahulu	27
2.9	Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	34
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	34
3.3	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	34
3.3.1	Objek Penelitian	34
3.3.2	Unit Analisis	34
3.3.3	Lokasi Penelitian	35
3.4	Jenis Data dan Sumber Data Penelitian	35
3.4.1	Jenis Data	35
3.4.2	Sumber Data Penelitian	35
3.5	Operasionalisasi Variabel	35
3.6	Metode Penarikan Sampel	36
3.7	Metode Pengumpulan Data	36
3.8	Metode Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
4.1	Deskripsi Singkat	37
4.1.1	Deskripsi Umum Mengenai PT. Metropolitan Land (Metland) Tbk	37
4.1.2	Struktur Organisasi PT. Metropolitan Land (Metland) Tbk	38
4.2	Penerapan PSAK 46 pada Laporan Keuangan PT. Metropolitan Land (Metland) Tbk	38
4.2.1	Kebijakan Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan ...	40
4.2.2	Penerapan Laporan Laba Rugi PT. Metropolitan Land Tbk (Metland) Tbk.....	44

4.3	Penerapan PSAK No 46 Akuntansi Pajak Tangguhan PT. Metropolitan Land (Metland) Tbk	51
4.4	Pembahasan	52
4.4.1	Penerapan PSAK 46 pada Laporan Keuangan PT. Metropolitan Land (Metland) Tbk	52
4.4.2	Penerapan PSAK No 46 Akuntansi Pajak Tangguhan PT. Metropolitan Land (Metland) Tbk	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	54
5.2	Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Ikhtisar Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Metropolitan land Tbk Periode 2015-2018	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	35
Tabel 4.1	Pajak dibayar dimuka	39
Tabel 4.2	Pajak dibayar dimuka	39
Tabel 4.3	Pajak dibayar dimuka	39
Tabel 4.4	Laporan Laba Rugi PT Metropolitan Land Tbk Tahun 2016 dan 2015	44
Tabel 4.5	Laporan Laba Rugi PT Metropolitan Land Tbk Tahun 2018 dan 2017	45
Tabel 4.6	Laporan Laba Rugi PT Metropolitan Land Tbk Tahun 2020 dan 2019	46
Tabel 4.7	Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2015	47
Tabel 4.8	Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2016	48
Tabel 4.9	Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2017	48
Tabel 4.10	Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2018	49
Tabel 4.11	Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2019	49
Tabel 4.12	Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2020	50
Tabel 4.13	Perhitungan Pajak Kurang/Lebih Bayar PT. Pelindo I, Tbk Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2020	51
Tabel 4.14	Penyajian Pajak Tangguhan PT. Pelindo I, Tbk Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2020	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Metropolitan Land (Metland) Tbk	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia seringkali dihadapkan dengan permasalahan dan persoalan khususnya dalam bidang ekonomi, yang terkadang berpengaruh terhadap jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, demi kelancaran pembangunan nasional begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan negara khususnya yang berasal dari sektor pajak. Setiap entitas memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh entitas dikenakan pajak setelah dikurang dengan biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan. Penghasilan tersebut kemudian akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atas seluruh penghasilannya. Tentu untuk kepentingan akuntansi komersial dapat tercermin dalam transaksi bisnis yang dapat memberikan penghasilan (Waluyo,2016).

Di Indonesia, pajak penghasilan dipungut dari wajib pajak melalui *self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajak. Peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan – UU PPh) dan standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban yang dapat memunculkan aset atau liabilitas pajak tangguhan yang harus diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan (Abdul Razzaq,2018).

Laporan Keuangan merupakan produk akhir dan serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang disusun dan disajikan secara jelas, jujur, dan benar berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (Herry,2015).

Indonesia mempunyai sebuah standar akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tujuan dibuatnya SAK ini adalah agar laporan keuangan dapat tersaji secara benar, jelas, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. Khusus untuk pajak penghasilan, SAK juga mengatur akan hal tersebut di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK Nomer 46 tentang pajak penghasilan. PSAK 46 tentang pajak

penghasilan memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya, yaitu adanya perbedaan temporer dan perbedaan permanen dalam aturan perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut menimbulkan istilah pajak tangguhan. Dalam menentukan pendapatan dan biaya. Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang perpajakan juga memiliki perbedaan. Dari perbedaan inilah atas kedua dasar tersebut maka dilakukanlah koreksi fiskal terhadap laporan keuangan menurut akuntansi atas laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dari koreksi fiskal ini dibuatlah laporan keuangan fiskal (Anisya Oktari Prawita, 2016).

PSAK 46 ini tentu saja diterbitkan agar salah satu komponen informasi perusahaan yang tak kalah penting, yaitu perpajakan disajikan dalam laporan keuangan dengan lebih informatif bagi pembacanya. Dengan menerapkan PSAK 46 pembaca laporan keuangan dapat mengetahui aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, yang dimiliki perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan. PSAK 46 ini mengatur bagaimana pencatatan dan pengakuan atas pajak penghasilan disajikan dalam laporan keuangan, bukan mengatur berapa jumlah pajak yang harus dibayar, karena untuk menghitung berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, acuan yang digunakan tetap undang-undang perpajakan. Jadi perhitungan dan cara menghitung pajak tidak ada yang berubah, hanya penyajian di dalam laporan keuangan saja yang berubah. Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih informatif bagi pembacanya, terutama bagi pihak eksternal.

Akibat dari perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal. Dalam perbedaan tersebut ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat temporer. Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena terjadi transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut pajak. Sedangkan perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Di dalam PSAK 46 perbedaan inilah yang akan dibahas terutama perbedaan yang bersifat temporer. Karena perbedaan temporer dapat menyebabkan pemulihan atau penyelesaian dimasa yang akan datang antara jumlah tercatat asset dan liabilitas, inilah yang menjadi isu utama dalam PSAK No. 46. Sedangkan perbedaan permanen ini tidak perlu disajikan karena tidak akan terpulihkan di masa yang akan datang.

Perbedaan jumlah pajak yang dibebankan perusahaan dengan jumlah yang terutang menyebabkan adanya selisih. Selisih antara biaya pajak dengan hutang pajak ini merupakan pajak tangguhan. Jika biaya pajak lebih besar dibandingkan dengan hutang pajak maka akan timbul hutang pajak tangguhan, sebaliknya, jika biaya pajak lebih kecil dibandingkan dengan hutang pajak maka akan timbul aset pajak tangguhan. Hal-hal mengenai pajak tangguhan diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan untuk dihitung dan diakui sesuai dengan PSAK No. 46. (Mely 2018).

Pajak tangguhan sebagai jumlah Pajak Penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih (*neto*) sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Pengakuan terhadap aset dan liabilitas pajak tangguhan berlandaskan fakta kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan liabilitas/pembayaran yang menjadi lebih besar atau kecil pada periode mendatang dibanding pembayaran pajak sebagai akibat pemuliharaan aset atau pelunasan liabilitas yang tidak memiliki konsekuensi pajak. (Waluyo, 2016).

Relaksasi pajak pertambahan nilai atau PPN properti belum mendongkrak pendapatan PT Metropolitan Land Tbk secara optimal. Selain hanya dipruntukan bagi rumah yang tersedia atau siap huni, pembatasan serah terima unit juga hanya terbatas hingga agustus 2021. Sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomer 21/KMK/010/2021, insentif PPN properti ditanggung pemerintah selama enam bulan untuk masa pajak 1 Maret-31 Agustus 2021. Mekanismenya, PPN di tanggung pemerintah dengan besaran 100% atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun seharga paling tinggi Rp 2 miliar hingga 5 miliar.(www.kompas.id)

Tidak semua perusahaan menerapkan PSAK No. 46 dengan tepat sesuai dengan penyesuaian yang ada seperti yang terdapat pada penelitian Windy Nawir Mansur (2012) yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangannya, namun belum sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi atas pajak di masa yang akan datang berupa perubahan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek.

PT Metropolitan Land Tbk bergerak dalam pengembang perumahan dan pembangunan gedung, dan menyediakan layanan terkait lainnya. Saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan terdiri dari akuisisi lahan, pengembang real estat, penyewaan, pembangunan hotel dan operasi, penjualan tanah dan bangunan termasuk rumah tinggal dan ruko, dan investasi pada anak perusahaannya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Desember 1994.

Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan konsolidasian PT Metropolitan Land Tbk dalam periode 2015-2020, di mana data yang digunakan ini adalah berupa akun-akun yang berkaitan dengan pajak penghasilan seperti data berikut ini yang diikhtisarkan oleh peneliti dan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Ikhtisar Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Metropolitan Land Tbk Periode 2015-2020

(Dalam ribuan Rp)

AKUN PAJAK	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pajak Dibayar Di Muka	15.968.773	4.338.003	8.511.112	5,934,357	47.690	39.096
Total Utang Pajak	52.371.362	51.826.805	66.927.615	25,239,075	53.732	29.185
Pajak Kini	2.267.505	1.165.371	650.461	508,785	2.018	277
Pajak Tangguhan	-244.346	4.218.158	1.608.781	105,955	822	86
Total Beban Pajak Penghasilan	2.023.159	5.383.529	2.259.242	660,108	2.840	141
Total Aset Pajak Tangguhan	3.401.222	260.886	247.093	313,818	380	812
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	(1.181.101)	(2.006.527)	(3.250.480)	(3,415,310)	(3.865)	(3.967)

Sumber: Laporan Keuangan Metropolitan Land Tahun 2015-2020

Informasi yang dapat diperoleh dari data di atas yang dinyatakan dalam satuan ribuan dengan mata uang rupiah, menunjukkan bahwa PT Metropolitan Land Tbk memiliki total pajak dibayar di muka yang mengalami Peningkatan dan Penurunan, pada tahun 2015 sebesar Rp 15.968.773, tahun 2016 sebesar Rp 4.338.003, tahun 2017 sebesar Rp 8.511.112, tahun 2018 sebesar Rp 5,934,357, tahun 2019 sebesar Rp 47.690 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 39.096 Demikian pula dengan total utang pajak yang selalu mengalami peningkatan dan Penurunan pada tahun 2015 Total utang Pajak Sebesar Rp 52.371.362 Dan pada tahun 2016 total utang pajak mengalami penurunan Rp 51.826.805 pada tahun 2017 mengalami peningkatan Rp 66.927.615 pada tahun 2018 terjadi penurunan kembali sebesar Rp 25,239,075 pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp 53.732 dan pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali sebesar Rp 29.185

Total beban pajak penghasilan PT Metropolitan Land Tbk yang diperoleh dari total pajak kini dan aset pajak tangguhan mengalami penurunan pada periode 2015-2018, total beban pajak kini di tahun 2015 sebesar Rp 2.267.505, di tahun 2016 sebesar Rp 5.383.529, di tahun 2017 sebesar Rp 2.259.242, dan di tahun 2018 sebesar Rp 660,108, di tahun 2019 sebesar Rp 2.018 dan di tahun 2020 sebesar Rp 277 dan total aset pajak tangguhan pada tahun 2015 Rp 3.401.222 dan tahun 2016 mengalami penurunan Rp 260.886 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan Rp 247.093 dan 2018 mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya 2016-2017 yaitu sebesar Rp 313,818 dan pada tahun 2019-2020 yaitu sebesar Rp 812

Dari akun liabilitas pajak tangguhan pada periode 2015-2018 mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan masing-masing total liabilitas pajak tangguhan di tahun 2015 sebesar Rp (1.181.101), tahun 2016 sebesar Rp (2.006.527), tahun 2017 sebesar Rp (3.250.480), tahun 2018 sebesar Rp (3,415,310) di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp (3.865) dan di tahun 2020 sebesar Rp (3.967)

Apabila PT Metropolitan Land Tbk menyajikan pajak tangguhan hanya dari entitas non jasa pembangunan, maka perusahaan telah menerapkan PSAK 46 dengan tepat dan sesuai, namun apabila pajak tangguhan yang disajikan juga berasal dari entitas jasa pembangunan yang penghasilannya dikenakan PPh final, maka penerapan PSAK 46 dalam perusahaan tersebut belum tepat dan sesuai karena PPh final sudah tidak menjadi ruang lingkup PSAK 46. Peneliti ingin mengetahui apakah penerapan PSAK 46 dalam penyajian pajak tangguhan PT Metropolitan Land Tbk adalah berasal dari entitas yang bergerak di bidang non jasa pembangunan saja atau berasal dari semua entitas yang tergabung dalam kelompok usaha PT Metropolitan Land Tbk baik yang bergerak di bidang jasa pembangunan maupun di bidang non jasa pembangunan.

Peneliti juga membandingkan bagaimana penerapan PSAK 46 pada sebuah entitas konsolidasian yang merupakan satu kesatuan dari entitas induk dan entitas anak. Perbandingan tersebut dilihat dari entitas induk dan sebagian entitas anaknya yang bergerak di bidang jasa pembangunan yang penghasilannya diakui terpisah dari penghasilan lain, sehingga pajaknya bersifat final menurut peraturan perpajakan setelah PSAK 46 dalam revisi tahun 2014 yang sudah menghilangkan aturan tentang pajak final, membandingkannya dengan penerapan pada entitas anak yang bergerak di luar bidang jasa pembangunan (non jasa pembangunan) yang penghasilannya diakui.

Berdasarkan dalam PT Metropolitan Land Tbk selalu mengalami kerugian di tahun 2015-2016, sehingga tidak dapat melakukan kompensasi kerugiannya. Peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyajian pajak penghasilan PSAK 46 pada laporan keuangan. dari penjelasan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat pembahasan topik penelitian ini diberi judul “**Analisis Penerapan PSAK 46 Pada PT Metropolitan Land Tbk Periode 2015-2020**”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan masalah melalui Implementasi PSAK 46 pada laporan keuangan dan penentuan perbedaan temporer dari pajak tangguhan yang terdapat pada PT Metropolitan Land Tbk, dengan menganalisis tingkat kesesuaian dari penerapan PSAK 46 pada laporan keuangan PT Metropolitan Land Tbk, sehingga melalui penentuan tersebut dapat terlihat apakah PT Metropolitan Land Tbk sudah menerapkan PSAK 46 dengan tepat dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

1.2.2 Perumusan Masalah

Agar terlihat jelas tujuan dan sasaran pembahasan, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis penerapan PSAK 46 atas laporan keuangan pada perusahaan PT. Metropolitan Land (persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2020?
2. Apakah analisis PSAK 46 pada perusahaan PT Metropolitan Land Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2020 telah sesuai dengan peraturan perpajakan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian adalah untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara fakta, pelaksanaan, kondisi dengan teori standar mengenai suatu variabel penelitian dengan menganalisis tingkat kesesuaian dari penerapan PSAK 46 pada laporan keuangan PT Metropolitan Land Tbk. sehingga melalui penelitian tersebut dapat terlihat apakah PT Metropolitan Land Tbk sudah menerapkan PSAK 46 dengan tepat dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah laporan keuangan PT Metropolitan Land Tbk telah sesuai dengan PSAK 46
2. Bertujuan untuk menganalisis PSAK 46 pada perusahaan PT Metropolitan Land Tbk apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan
3. Untuk mengetahui analisis PSAK 46 atas laporan keuangan pada PT Metropolitan Land Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2020

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan, peneliti ini dapat menjadi evaluasi serta menjadi suatu kebijakan agar dapat memecahkan masalah pada perusahaan terhadap laporan keuangan agar dapat melakukan penyajian dan pelaporan laporan keuangan sesuai PSAK 46 yang telah diatur.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan khususnya mengenai masalah yang diteliti dan menjadi bahan referensi yang dapat digunakan sebagai bahan pengembangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya terkait analisis penerapan PSAK 46.

BAB II

TUJUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut undang-undang no. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam resmi (2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat dalam resmi (2017) pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam resmi (2017) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan definisi pajak diatas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri pajak itu meliputi: dipungut berdasarkan undang-undang/ aturan hukum, merupakan peralihan kekayaan orang/ badan ke kas negara, tidak ada imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak secara individual, dapat dipaksakan, pembayaran berulang-ulang atau sekaligus untuk membiayai pengeluaran pemerintah,

alat untuk mencapai tujuan tertentu, serta pemungutan dapat langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan definisi pajak diatas, maka dapat disimpulkan pajak memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
Dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut fungsinya, ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi (*budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut golongannya pajak terdiri dari :

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

Menurut sifatnya pajak terdiri dari:

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.

Asas Pemungutan Pajak, yaitu:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Sistem Pemungutan Pajak, yaitu:

1. *Official Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini, dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari penanaan pajak penghasilan yang besar.

2.2. Pajak Penghasilan

Penghasilan merupakan penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Pajak penghasilan merupakan pajak yang langsung dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Fitriandi, dkk (2015) menyatakan bahwa: Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi

atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Resmi (2014) menyatakan bahwa: Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Suandy (2005) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak.

2.2.1. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Adapun jenis-jenis pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2011) berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan Pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak luar negeri.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan UU PPh merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.

Subjek Pajak Pasal 22 yaitu:

- a. Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang

- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada butir d;
 - d. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Umum Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan Bank-Bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
 - e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya didalam negeri;
 - f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas.
 - g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas penjualan bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
 - h. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23
Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak Penghasilan 21 yang dibayarkan, di sediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 4. Pajak Penghasilan Pasal 24
Ketentuan dalam Pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak

luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut *tax credit* yang *ordinary credit method* dengan menerapkan per *country limitation*.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Ketentuan Pasal 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 25) atau melalui pemotongan oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21,22,23,dan 24). Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan

Secara umum pengertian subjek adalah siapa yang dikenakan pajak. Menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

3. Badan

Pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

4. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat Kedudukan Manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik;
- f. Bengkel
- g. Pertambangan dan penggalian sumber alam wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
- h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan
- i. Proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan
- j. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- k. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- l. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang PPh, subjek pajak dalam PPh terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Kedua jenis subjek pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

- a. Orang Pribadi
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri

Sedangkan yang termasuk sebagai subjek pajak luar negeri adalah

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- c. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.3. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2017) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.4. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini :

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh) penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak Subjektif
Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif
Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan (PPnBM).
 - b. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1: Obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan. Kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang;
7. Dividen, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti dan imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
12. Keuntungan selisih Kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

Pengecualian obyek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan Khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat;
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Bagi perseroan terbatas badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham, pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
12. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - a. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Jakarta;
13. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
14. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau lebih penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
15. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final adalah:

1. Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dan transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate* dan persewaan tanah dan bangunan; Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.2.6 Undang-Undang yang Mengatur Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen oleh:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

2.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK No. 46

2.3.1. Pengertian PSAK No. 46

Di dalam peraturan akuntansi PSAK No. 46 mengatur tentang perlakuan akuntansi pajak penghasilan. Menurut Waluyo (2016) Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 46 menggunakan dasar akrual yang mengatur Pajak Penghasilan yang kurang bayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam masa pajak dan mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan terhadap konsekuensi pajak periode mendatang, atas transaksi yang telah diakui sebagai unsur laba komersial tetapi belum diakui sebagai laba fiskal atau sebaliknya. Dasar akrual dalam akuntansi pajak karena faktor kepastian peraturan pajak dan digunakan *self assessment system* sebagai dasar pemungutan pajak.

Menurut Waluyo (2016), PSAK No. 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan, yaitu cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk:

1. Nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat liabilitas yang diakui pada neraca perusahaan.

2. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain ada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

PSAK 46 ini menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan di antara penyajian laporan keuangan akuntansi komersial dan laporan keuangan fiskal, di dalam penelitian ini, peneliti membahas PSAK No. 46 dari sisi perbedaan temporer. Dengan PSAK No. 46, perusahaan memepertanggungjawabkan konsekuensi pajak tidak hanya pada periode berjalan, tetapi juga pada periode mendatang, yaitu dengan mengakuinya adanya aset atau kewajiban pajak tangguhan. (IAI,2011)

2.3.2. Tujuan PSAK No. 46

Dalam buku PSAK No. 46 bagian pendahuluan, tercantum paragraf yang menjelaskan tujuan dari PSAK No. 46 ini di mana pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Isu utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal berikut:

1. Pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset atau liabilitas di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas.
2. Transaksi dan peristiwa lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas.

Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari rugi pajak belum di kompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan pajak penghasilan.

2.3.3. Adopsi IFRS pada PSAK 46

Di dalam PSAK 46 sendiri terdapat beberapa poin-poin yang mengemukakan bahwa PSAK 46 ini diadopsi dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau International Financial Reporting Standards (IFRS) yang mencakup peraturan-peraturan Standar Akuntansi Internasional atau disebut dengan International Accounting Standards (IAS) sehingga dengan PSAK 46 ini, informasi-informasi dalam laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah entitas dapat diterima oleh negara mana pun karena sudah mengadopsi aturan-aturan dan kaidah yang ditetapkan oleh standar akuntansi secara internasional dalam penyajiannya. Contoh yang disampaikan dalam PSAK ini merupakan contoh-contoh yang diadopsi dari IAS 12 income taxes. Penerapan contoh tersebut perlu memperhatikan kesesuaian praktik di Indonesia. Namun tidak semua paragraf dalam IAS 12 ini diadopsi oleh PSAK 46, adapun beberapa paragraf tersebut yang tidak diadopsi tersebut dijelaskan dalam PSAK 46 sebagai berikut ini: PSAK 46: Pajak Penghasilan mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 12 Income Taxes per efektif 1 Januari 2014 kecuali:

1. IAS 12 paragraf 5 tentang definisi aset pajak tangguhan dengan menambahkan persyaratan dan kesesuaian dengan peraturan perpajakan

untuk pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan. PSAK 46 juga memberikan catatan kaki mengenai penjelasan atas akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam IAS 12 yang memperbolehkan pengaturan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan (tanpa ada penjelasan lebih lanjut).

2. IAS 12 paragraf 11 tentang ketentuan dasar pengenaan pajak untuk laporan keuangan konsolidasian disesuaikan dengan kondisi pelaporan perpajakan di Indonesia.
3. IAS 12 paragraf 89 tentang tanggal efektif.
4. IAS 12 paragraf 90-98C tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi tidak diadopsi karena hal tersebut tidak relevan. Adopsi IAS 12 menjadi PSAK 46 telah menggunakan IAS 12 yang telah mengakomodir amandemen tersebut.
5. IAS 12 paragraf 99 tentang penarikan standar lain. IAS 12 menarik SIC 21 Income Taxes-Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets. Penarikan tersebut tidak relevan karena SIC 21 tidak diadopsi.
6. PSAK 46 menambahkan Dasar Kesimpulan tentang latar belakang pencabutan pengaturan pajak penghasilan final dan pengaturan hal khusus.

2.3.4. Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Pajak kini diketahui sebagai beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Sedangkan pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat dari adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2016).

Dwi Martani (2016) menjelaskan tentang pengakuan pajak kini dan pengakuan pajak tangguhan, yang diuraikan sebagai berikut:

Pengakuan Pajak Kini:

1. Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas.
2. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset.
3. Manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dan periode sebelumnya harus diakui sebagai aset.

Untuk Pengakuan Pajak Tangguhan:

1. Pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak yang lebih besar dari penghasilan kena pajak, maka ada pengakuan menurut akuntansi sehingga diakui beban pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan.
2. Pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak yang lebih kecil dari penghasilan kena pajak, maka pajak yang dibayar lebih besar daripada laba menurut akuntansi sehingga diakui aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan.
3. Pada saat perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan di masa mendatang, dan manfaat pajak tangguhan.
4. Aset pajak tangguhan ditinjau untuk memastikan bahwa manfaat di masa mendatang akan diperoleh entitas.

2.4 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer

2.4.1 Perbedaan Permanen

Perbedaan permanen (*permanent difference*) timbul sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak/fiskal. Akibat dari perbedaan ini berakibat juga pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar menghitung pajak yang terutang. Sebagai contoh, pemberian imbalan kepada karyawan dalam bentuk natura, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan tetapi juga tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya bagi Wajib Pajak (Waluyo, 2016).

Sedangkan Siti Resmi (2017) menyatakan bahwa perbedaan permanen terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
2. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
3. Biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expenses*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

2.4.2 Perbedaan Temporer

Menurut Waluyo (2016) perbedaan temporer yang dimaksud sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada aset atau liabilitas yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah (*future taxable amount*) atau berkurang (*future deductible amount*) pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi/dibayar. Perbedaan temporer ini berakibat harus diakuinya aset dan/atau liabilitas pajak tangguhan. Hal ini dapat terjadi pada kondisi:

1. Penghasilan atau beban yang harus diakui untuk menghitung laba fiskal atau laba komersial dalam periode berbeda;
2. *Goodwill* atau *goodwill* negatif yang terjadi saat konsolidasi;
3. Perbedaan nilai tercatat dengan *tax base* dari suatu aset atau liabilitas pada saat pengakuan awal;
4. Bagian dari biaya perolehan saat penggabungan usaha yang bermakna akuisis dialokasikan ke aset atau liabilitas tertentu atas dasar nilai wajar, perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak

Dalam buku PSAK No. 46 mendefinisikan perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:

1. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau
2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

2.4.3 Perbedaan Temporer Kena Pajak

Perbedaan temporer kena pajak terdapat di dalam PSAK 46 pada paragraf 15 yang dijelaskan sebagai berikut:

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari:

1. Pengakuan awal *goodwill*; atau
2. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang:
 - a. Bukan kombinasi bisnis; dan
 - b. Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama, maka liabilitas pajak tangguhan diakui sesuai dengan paragraf 39.

2.4.4 Perbedaan Temporer Dapat Dikurangkan

Ketentuan perbedaan temporer dapat dikurangkan tercantum dalam PSAK 46 paragraf 24 sebagai berikut:

15 Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas yang:

1. Bukan kombinasi bisnis; dan
2. Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama, maka aset pajak tangguhan diakui sesuai dengan paragraf 44.

2.5 Laporan Keuangan Konsolidasian

Menurut PSAK 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, definisi dari laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.

Laporan konsolidasi menggambarkan kesatuan entitas induk dan entitas anak yang dalam operasi sehari-harinya entitas tersebut adalah entitas-entitas yang terpisah. Pengendalian perusahaan induk atas anak menyebabkan dalam banyak hal operasi anak dipengaruhi oleh induk, dengan demikian akan banyak terjadi transaksi antara induk dan anak. Berikut ini merupakan contoh penyajian laporan keuangan konsolidasian dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari entitas induk (Pen) dan anak (Sel).

2.6 Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri atas beban pajak kini dalam tahun berjalan dan beban pajak tangguhan yang merupakan jumlah pajak terutang dan pajak tangguhan. PSAK 46 juga memberikan beberapa definisi-definisi untuk dipahami sebagai berikut:

1. Beban pajak adalah jumlah gabungan dari pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi akuntansi dalam satu periode berjalan.

2. Pajak kini adalah jumlah dari pajak penghasilan terutang atas Penghasilan Kena Pajak untuk satu periode berjalan.
3. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak entitas.
4. Laba akuntansi adalah laba bersih sebelum dikurangi beban pajak laba (rugi) sebelum pajak dalam suatu periode akuntansi.
5. Laba atau Rugi Fiskal atau Penghasilan Kena Pajak adalah laba atau rugi dalam suatu tahun pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak berjalan.
6. Beban Pajak Tangguhan adalah jumlah beban pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan.
7. Liabilitas Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
8. Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

2.7 Penyajian Laporan Keuangan

2.7.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibutuhkan dalam menggambarkan posisi dan kinerja suatu perusahaan yang akhirnya digunakan oleh berbagai kalangan. Misalnya bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. (Hery, 2015)

2.7.2 Pengertian Laporan Komersial

Dalam laporan keuangan komersial seseorang dapat memahami konsep bahwa setiap organisasi memerlukan informasi tentang keadaan yang sudah terjadi selama suatu periode tertentu.

Menurut Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati (2008) adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan menilai kondisi dan kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum yaitu standar akuntansi keuangan (SAK).

Sedangkan menurut Gunadi (2009) laporan keuangan komersial adalah Informasi yang disajikan oleh akuntansi keuangan kepada manajemen atau pihaak

lain sehingga dapat diambil suatu penilaian dan kesimpulan atas segala sesuatu yang terjadi serta keputusan yang dilakukan selanjutnya.

2.7.3 Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Gunadi (2009) laporan keuangan yang memiliki kriteria tertentu dalam pengukuran dan pengakuan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati (2008) laporan keuangan yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan seperti menghitung pajak tangguhan masa yang akan datang dan pajak kini yang terhutang pada periode berjalan, dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mewajibkan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2.7.4 Tujuan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Kriteria pengukuran dan pengakuan terhadap laporan keuangan komersial adalah PSAK. Sedangkan dalam kriteria dan pengakuan laporan keuangan fiskal diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga tujuan dari kedua laporan tersebut memungkinkan adanya perbedaan atau tidak sejalan.

2.7.5 Fungsi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Selain dalam tujuan, fungsi laporan keuangan dan laporan fiskal pun berbeda. Dalam halnya laporan fiskal dapat menjadi bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak oleh administrasi, terutama aktifitas penyidikan dan pemeriksaan pajak.

Menurut Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati (2008) fungsi dari laporan keuangan komersial adalah untuk menggambarkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan tersebut, yang bermanfaat bagi pihak manajemen dan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan fungsi laporan fiskal menurut Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati (2008) adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

2.7.6 Hubungan PSAK No. 46 dengan Peraturan Perpajakan

Waluyo (2016) menjelaskan tentang hubungan PSAK No. 46 dengan ketentuan perpajakan bahwa laporan keuangan perusahaan dihasilkan tidak hanya untuk kepentingan manajemen, tetapi untuk kepentingan otoritas pajak yang dituangkan dalam bentuk SPT. Ketentuan dalam standar akuntansi keuangan tidak selamanya sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu PSAK No. 46 ini sebagai respon dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Laporan neraca dan laba rugi yang dihasilkan sistem akuntansi memiliki beberapa perbedaan aturan sehingga menimbulkan perbedaan sudut pandang kedalam prinsip metode akuntansi. Seperti standar akuntansi keuangan menggunakan pendekatan aset-liabilitas (*asset-liability approach*) sedangkan Undang-Undang Perpajakan menggunakan pendekatan pendapatan-beban (*revenue-expense approach*). Dan pengakuan penyusutan seperti contoh penyusutan aset tetap secara akuntansi memiliki umur ekonomi 10 tahun, sedangkan menurut aturan pajak penyusutan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai jenisnya. Misalnya kelompok 1 dan umur manfaat 4 tahun.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memilih beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai variabel yang sama dan sesuai dengan pembahasan yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini. Beberapa penelitian yang dijadikan rekomendasi dan referensi dalam penelitian ini di antaranya:

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Revisi PSAK 46 (Pajak Penghasilan) Terhadap Kesesuaian Penyajian Pelaporan Keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Periode 2012-2016” oleh Abdur Razzaq (2018).

Melakukan penelitian untuk mendeskripsikan penyajian pajak penghasilan PSAK 46 pada laporan keuangan PT Krakatau Steel sebelum dan sesudah adanya revisi 2014. Menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan teknik analisis deskriptif non-statistik. PT Krakatau Steel periode 2012-2014 sudah sesuai menyajikan PSAK 46, dilihat dari konsistennya PT Krakatau Steel menyajikan aset dan liabilitas pajak tangguhan dan terdapat beban/manfaat pajak tangguhan pada penyajian laporan laba rugi komprehensif, dengan adanya revisi 2014 tidak mengubah adanya kesesuaian penyajian laporan keuangan.

Anisya Oktari Prawita (2013) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Penghitungan PPh Terutang Pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 46 dan dampak dari penerapan PSAK No. 46. Penelitian dilakukan di PT Kimia Farma (Persero) Tbk dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif dengan merumuskan hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghitungan PPh terutang pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk. telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 46 dan juga telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian Budi Rahman Saputra (2016) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Tangguhan Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No.46 atas pajak tangguhan pada perusahaan Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan analisis data melalui perbandingan penerapan pajak tangguhan pada perusahaan dengan PSAK No. 46. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah sama dengan standar yang diatur dalam penerapan

kesesuaian dengan PSAK No. 46, dikarenakan proses pelaporannya sudah sangat baik dari segi akuntabilitas dengan hal-hal yang perlu ditambahkan dalam pelaporannya yaitu mengenai penyertaan kebijakan standar tentang PSAK No.46 atas pajak tangguhannya.

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT MNC Sky Vision KPP Malang” yang ditulis oleh Dwi Artha Cahyono Putra mengemukakan analisis penerapan PSAK No. 46 dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptive comparative yaitu menjelaskan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 46 yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan khususnya penyajian pajak tangguhan kemudian membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 46. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT.MNC Sky Vision KPP Malang belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 46. Setelah diterapkannya PSAK No. 46 ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu yang berasal dari perbedaan metode penyusutan aktiva tetap dan tarif yang digunakan antara perusahaan dengan peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ivana Cendra (2012) berjudul “Analisis Penerapan PSAK No.46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Di PT UG” memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan PSAK No. 46 yang tepat pada laporan keuangan PT UG. Penelitian dilakukan di PT UG dengan sumber data primer dan sekunder, diperoleh dengan wawancara, dan observasi. Analisa data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akun perbedaan temporer yang diperhitungkan PT UG dalam menghitung pajak tangguhan hanya penyisihan piutang tak tertagih dan kewajiban imbalan kerja. Sedangkan perbedaan temporer dari akun aset tetap dan biaya yang masih harus dibayarkan tidak diperhitungkan.

Lucrecia Fransisca Awusi (2011) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. Usaha Putri Poso” dengan tujuan untuk mengetahui prosedur dan perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan PSAK No. 46 serta dampak penerapannya terhadap penyajian laporan keuangan PT Usaha Putri Poso. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptive comparative, yaitu menjelaskan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 19 No. 46 yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan khususnya penyajian pajak tangguhan kemudian membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 46. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Usaha Putri Poso belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No.46. Setelah diterapkannya PSAK No. 46 ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu yang berasal dari perbedaan metode penyusutan aktiva tetap dan tarif yang digunakan antara perusahaan dengan peraturan perpajakan. Dan hasil

penelitian juga menunjukkan laba bersih perusahaan menjadi lebih kecil dari tahun 2009 hingga 2010 akibat adanya beban pajak tangguhan sebagai dampak dari penerapan PSAK No. 46.

Peneliti yaitu ibu Siti Maimunah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Penyajian dan Pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Tentang Kombinasi Bisnis pada Laporan Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan kombinasi bisnis pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Hasil dari penelitian ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dalam penyajian laporan keuangannya secara keseluruhan telah sesuai dengan standar yang mengaturnya, tetapi dalam kegiatan kombinasi bisnisnya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 22 revisi 2010 dari kegiatan akuisisi yang menghasilkan goodwill.

Windy Nawir Mansyur (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan PT Prima Karya Manunggal” dengan tujuan untuk mengetahui apakah PT Prima Karya Manunggal telah menerapkan PSAK No. 46 dalam laporan keuangannya. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa PT Prima Karya Manunggal telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangannya, namun belum sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi atas pajak di masa yang akan datang berupa kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek, dengan menyarankan untuk melakukan jurnal penyesuaian.

Muhammad Mulyandi (2019) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 46 Atas Entitas Non Jasa Konstruksi pada Kelompok Usaha PT Wijaya Karya (Persero) TBK yang Disajikan pada Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 2015-2017” Peneliti ingin mengetahui apakah penerapan PSAK 46 dalam penyajian pajak tangguhan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk adalah berasal dari entitas yang bergerak di bidang non jasa konstruksi saja atau berasal dari semua entitas yang tergabung dalam kelompok usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk baik yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan bangunan maupun di bidang non jasa konstruksi.

Riza permatasari (2020) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018” keinginan peneliti untuk mengetahui apakah akuntansi pajak dilaksanakan secara baik pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dari penjabaran penelitian terdahulu di atas, peneliti menjelaskan secara ringkas penelitian terdahulu tersebut ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Mulyandi 2019	Analisis Penerapan PSAK 46 Atas Entitas Non Jasa Konstruksi pada Kelompok Usaha PT Wijaya Karya (Persero) TBK yang Disajikan pada Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 2015-2017	PSAK 46	<ul style="list-style-type: none"> Analisis data melalui perbandingan penerapan pajak tangguhan dengan PSAK No. 46. 	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sudah menerapkan PSAK 46 dengan tepat dan memadai serta menjelaskan bahwa dalam laporan posisi keuangan aset pajak tangguhan sudah disajikan terpisah dari aset pajak kini dan beban.
2	Riza permatasari 2020	Implementasi PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018	PSAK 46	<ul style="list-style-type: none"> Metode deskriptif kualitatif non statistik 	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 secara tepat dan memadai pada laporan keuangan konsolidasian. Hal ini dilihat dari perusahaan telah mengakui adanya aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.
3	Abdur Razzaq	Analisis Pengaruh Revisi PSAK 46 (Pajak Penghasilan) Terhadap Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Periode 2012-2016	PSAK 46	<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan Perbedaan temporer kena pajak Penghasilan kena pajak 	Penyajian PSAK 46 pada Laporan keuangan PT Krakatau Steel sudah sesuai. Dilihat dari Laporan Posisi Keuangan yang konsisten menyajikan aset dan liabilitas pajak tangguhan, dengan adanya revisi 2014 tidak mengubah adanya kesesuaian penyajian laporan keuangan
4	Anisya Oktari Prawita	Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Penghitungan PPh Terutang Pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	PSAK 46	<ul style="list-style-type: none"> Metode analisis deskriptif eksploratif, Menggunakan data kuantitatif. 	Penghitungan PPh terutang pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk. telah sesuai dengan ketentuan PSAK 46 dan ketentuan perpajakan yang berlaku
5	Budi Rahman Saputra	Analisis Penerapan PSAK No.46 Atas Pajak Tangguhan Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	PSAK 46	<ul style="list-style-type: none"> Analisis data melalui perbandingan penerapan pajak tangguhan dengan PSAK No. 46. 	Perusahaan konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah sesuai dengan standar yang diatur dalam penerapan kesesuaian dengan PSAK No. 46, karena proses pelaporannya sudah sangat baik dari segi akuntabilitas dengan catatan hal[1]hal yang perlu ditambahkan dalam pelaporannya yaitu mengenai penyertaan kebijakan standar tentang PSAK No.46 atas pajak

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					tangguhannya
6	Windy Nawir Mansyur	Analisis Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan PT Prima Karya Manunggal	PSAK 46	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian deskriptif comparatife, jenis data yang digunakan kualitatif dan kuantitatif 	Perusahaan telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangannya, namun belum sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi atas pajak di masa yang akan datang berupa perubahan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek.
7	Siti Maimunah	Analisis penerapan prinsip penyajian dan pengungkapan standar akuntansi keuangan indonesia tentang kombinasi bisnis pada laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk Periode 2012-2014	Kombinasi bisnis	<ul style="list-style-type: none"> Peneliti ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan data primer berupa kuesioner sebagai pendukung teori yang diterapkan oleh peneliti. 	PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk dalam penyajian laporan keuangannya secara keseluruhan telah sesuai dengan standar yang mengaturnya, tetapi dalam kegiatan kombinasi bisnisnya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 22 revisi 2010 dari kegiatan akuisisi yang menghasilkan <i>goodwill</i> .
8	Dwi Artha Cahyono Putra	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT MNC Sky Vision KPP Malang	PSAK 46	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian descriptive comparative, yaitu menjelaskan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 46 dan membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 46. 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT.MNC Sky Vision KPP Malang belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 46. Setelah diterapkannya PSAK No. 46 ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak tanggihan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu yang berasal dari perbedaan metode penyusutan aktiva tetap.
9	Ivana Cendra	Analisis Penerapan PSAK No.46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Di PT UG	PSAK 46	<ul style="list-style-type: none"> Jenis penelitian adalah metode deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, Metode analisa data yang 	Akun perbedaan temporer yang diperhitungkan PT UG dalam menghitung pajak tanggihan hanya penyisihan piutang tak tertagih dan kewajiban imbalan kerja. Sedangkan perbedaan temporer dari akun aset tetap dan biaya

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				digunakan adalah metode data deskriptif.	yang masih harus dibayar tidak diperhitungkan.
10	Lucrecia Fransisca Awusi	Analisis Penerapan PSAK No.46 Terhadap Laporan Keuangan PT Usaha Putri Poso	PSAK 46	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian ini menggunakan metode deskriptive comparative, dengan menggunakan data sekunder. 	PT Usaha Putri Poso belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No.46 setelah diterapkannya PSAK No. 46 ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu yang berasal dari perbedaan metode penyusutan aktiva tetap dan tarif yang digunakan. Hasil penelitian juga menunjukkan laba bersih perusahaan menjadi lebih kecil dari tahun 2009 hingga 2010 akibat adanya beban pajak tangguhan sebagai dampak dari penerapan PSAK No. 46

2.9 Kerangka Pemikiran

Pada umumnya laporan keuangan entitas disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu disebut dengan laporan keuangan komersial. Namun perusahaan juga dituntut untuk melakukan sumbangsih terhadap negara melalui pajak, dalam pelaporan pajak, perusahaan tidak menggunakan laporan keuangan komersial, melainkan menggunakan laporan keuangan fiskal, karena pengakuan penghasilan menurut akuntansi dan pajak sangat berbeda, perbedaan inilah yang harus diatasi. Untuk itu dibuatlah PSAK No. 46 oleh IAI untuk menjawab semua perbedaan tersebut sehingga menghasilkan penghasilan yang dapat diterima oleh akuntansi dan perpajakan.

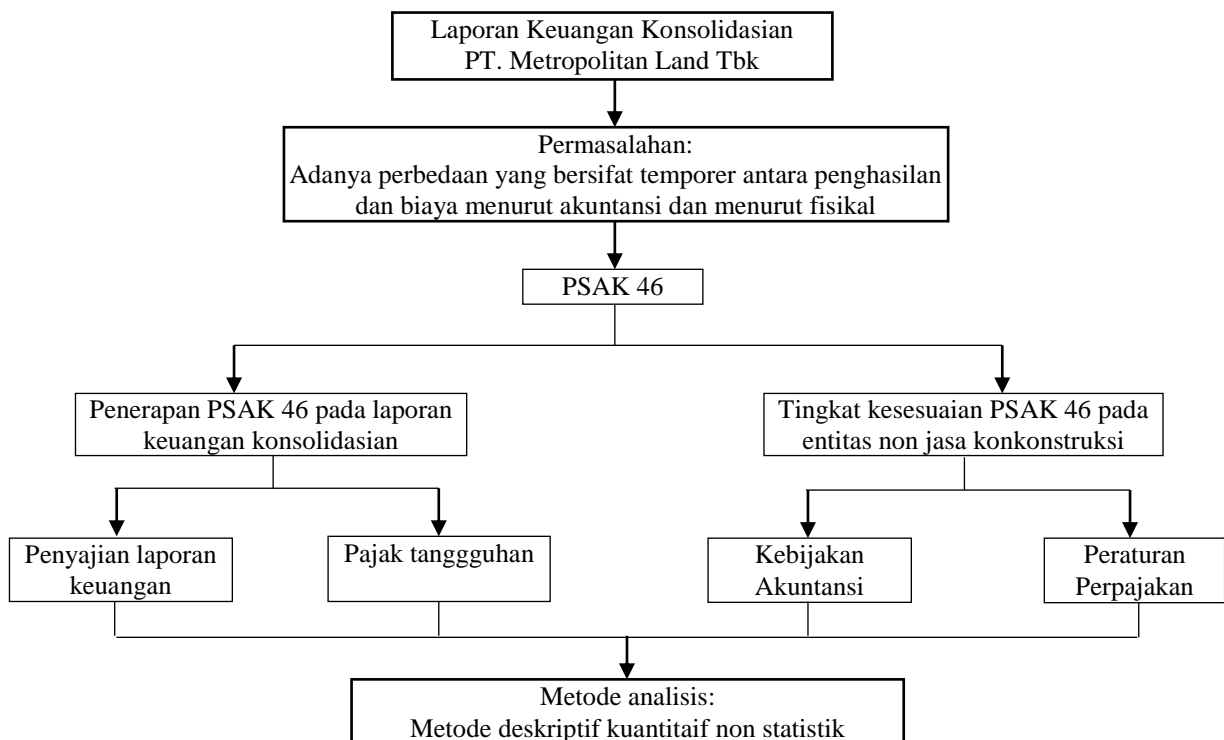
PSAK No. 46 membahas aspek-aspek mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. Namun dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pembahasan aspek penyajian dan pengungkapan dalam PSAK No. 46 pada penerapannya di laporan keuangan PT Metropolitan Land Tbk yang terkait dengan pajak penghasilan. Apakah terdapat kesesuaian antara teori didalam PSAK No. 46 dengan fakta yang ditemukan didalam perusahaan dalam hal ini fakta-fakta yang diungkapkan berupa laporan keuangan PT Metropolitan Land Tbk.

Dalam PSAK No. 46 terdapat dua perbedaan, ada perbedaan temporer dan perbedaan permanen, fokus dalam penelitian ini adalah perbedaan temporer, karena perbedaan temporer dapat dipulihkan atau diselesaikan di masa yang akan datang sedangkan perbedaan permanen tidak bisa diganggu gugat karena pengakuan antara

akuntansi komersial memiliki pengakuannya masing-masing. Untuk mengatasi perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan maka dibuatlah rekonsiliasi fiskal. Akibat dari rekonsiliasi ini memunculkan koreksi fiskal positif maupun negatif dari perbedaan temporer tersebut terhadap laporan keuangan menurut akuntansi atas laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dari koreksi fiskal ini dibuatlah laporan keuangan fiskal.

Dengan adanya PSAK No. 46 terdapat 2 (dua) beban pajak yang harus diakui dan dicatat dalam laporan keuangan yaitu pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini merupakan jumlah PPh terutang atau penghasilan kena pajak periode berjalan sedangkan pajak tangguhan merupakan hasil dari perbedaan pengakuan penghasilan dan beban dari saldo secara komersial dan fiskal yang hal tersebut menjadi perbedaan temporer. Jumlah pajak penghasilan harus diperhitungkan dalam laporan laba rugi periode berjalan karena akan berdampak pada pajak kini akan muncul, apakah dari pajak tangguhan akan menambah atau mengurangi pajak kini yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. (Razaaq, 2018).

Dari uraian tersebut, maka peneliti telah membuat kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif eksploratif. Metode penelitian ini adalah berdasarkan studi kasus. Yaitu Analisis penerapan PSAK No 46 pada PT Metropolitan Land Tbk.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 2019). Selain itu, satu orang atau satu objek penelitian pun dapat menjadi atau digunakan sebagai suatu populasi dikarenakan satu orang atau satu objek tersebut memiliki berbagai karakteristik tertentu. Oleh karena itu, populasi pada penelitian adalah PT. Metropolitan Land Tbk atas laporan keuangan yang diterbitkan pada tahun 2015-2020.

Kemudian, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel jenuh sebagai metode pengambilan sampel. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2019). Berdasarkan paparan tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah PT. Metropolitan Land Tbk atas laporan keuangan yang diterbitkan selama tahun 2015-2020.

3.3 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah PSAK 46, dengan menganalisis penerapan-penerapannya yang dituangkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah PT Metropolitan Land Tbk.

3.3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organization, yaitu unit yang diteliti dalam analisis ini adalah sebuah perusahaan yang terbentuk dalam sebuah organisasi dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, sehingga data dalam penelitian ini mengenai organisasi tersebut dan berasal dari organisasi tersebut.

3.3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah di PT Metropolitan Land Tbk dengan mengunduh data laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2015-2020 yang diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder mengenai laporan keuangan yang berisi mengenai angkaangka, jumlah, perbandingan, dan jumlah mata uang yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang diakses melalui situs BEI.

3.4.2 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui akses ke website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan melalui website resmi PT Metropolitan Land Tbk., yaitu www.metropolitanland.com. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan konsolidasian dan laporan tahunan dari PT Metropolitan Land Tbk, yang merupakan data sekunder dan data tersebut diperoleh berupa laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi-informasi mengenai perusahaan yang menjadi subjek penelitian dalam laporan tahunan pada periode 2015-2020.

3.5 Operasionalisasi Variabel

Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: Penerapan PSAK 46 pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Metropolitan Land Tbk. Variabel independen tersebut dijelaskan pada tabel operasionalisasi variabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel
Analisis Penerapan PSAK 46 Pada PT Metropolitan Land Tbk
Periode 2015-2020

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Analisis Penerapan PSAK 46 Pada PT Metropolitan Land Tbk Periode 2015-2020	Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan Konsolidasian	Penyajian laporan keuangan Pajak tangguhan konsolidasi	<ul style="list-style-type: none"> Laporan posisi keuangan Laporan laba rugi komperhensif, Nilai aset pajak tangguhan, Nilai liabilitas pajak tangguhan 	Rasio
	Kesesuaian penerapan PSAK No. 46 terhadap kebijakan akuntansi dan ketentuan perpajakan	Kebijakan akuntansi dan peraturan perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan nilai tercatat aset tetap Penyisihan penurunan nilai piutang Kerugian fiskal Liabilitas imbalan pasca kerja 	Rasio

3.6 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel data yang diperoleh dari media elektronik seperti melalui kegiatan akses di internet dengan menggunakan perangkat komputer dan gawai lainnya. Sehingga diperoleh data laporan keuangan konsolidasian dan laporan tahunan yang berfokus pada satu perusahaan yaitu PT Metropolitan Land Tbk Periode 2015-2020.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Setelah sampel data telah diperoleh, kemudian data tersebut peneliti kumpulkan dengan media pengumpulan elektronik, seperti melalui kegiatan akses di internet dengan menggunakan perangkat komputer dan media elektronik lainnya. Sehingga diperoleh data laporan keuangan konsolidasian dan laporan tahunan PT Metropolitan Tbk yang diakses dan dikumpulkan oleh peneliti melalui situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan PT Metropolitan Land Tbk yaitu www.metropolitanland.com.

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif non statistik yaitu :

1. Metode analisis yang digunakan untuk menjelaskan variabel, indikator, dan ukuran tentang penerapan PSAK 46 pada laporan keuangan konsolidasian.
2. Peneliti juga membandingkan bagaimana penerapan PSAK 46 pada sebuah entitas konsolidasian yang merupakan satu kesatuan dari entitas induk dan entitas anak.
 - a. Perbandingan tersebut dilihat dari entitas induk dan sebagian entitas anaknya yang bergerak di bidang jasa pembangunan yang penghasilannya diakui terpisah dari penghasilan lain, sehingga pajaknya bersifat final menurut peraturan perpajakan setelah PSAK 46 dalam revisi tahun 2014 yang sudah menghilangkan aturan tentang pajak final.
 - b. Membandingkannya dengan penerapan pada entitas anak yang bergerak di luar bidang jasa pembangunan (non jasa pembangunan) yang penghasilannya diakui.
 - c. Serta analisis kualitatif adalah dengan cara melakukan rekonsiliasi laba akuntansi ke fiskal sesuai dengan undang undang perpajakan yang berlaku, mengidentifikasi perbedaan temporer, kemudian mengelompokkan perbedaan temporer tersebut sebagai aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan
 - d. Menghitung aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan per 31 Desember sesuai dengan tarif PPh yang berlaku dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 46 pajak penghasilan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Singkat

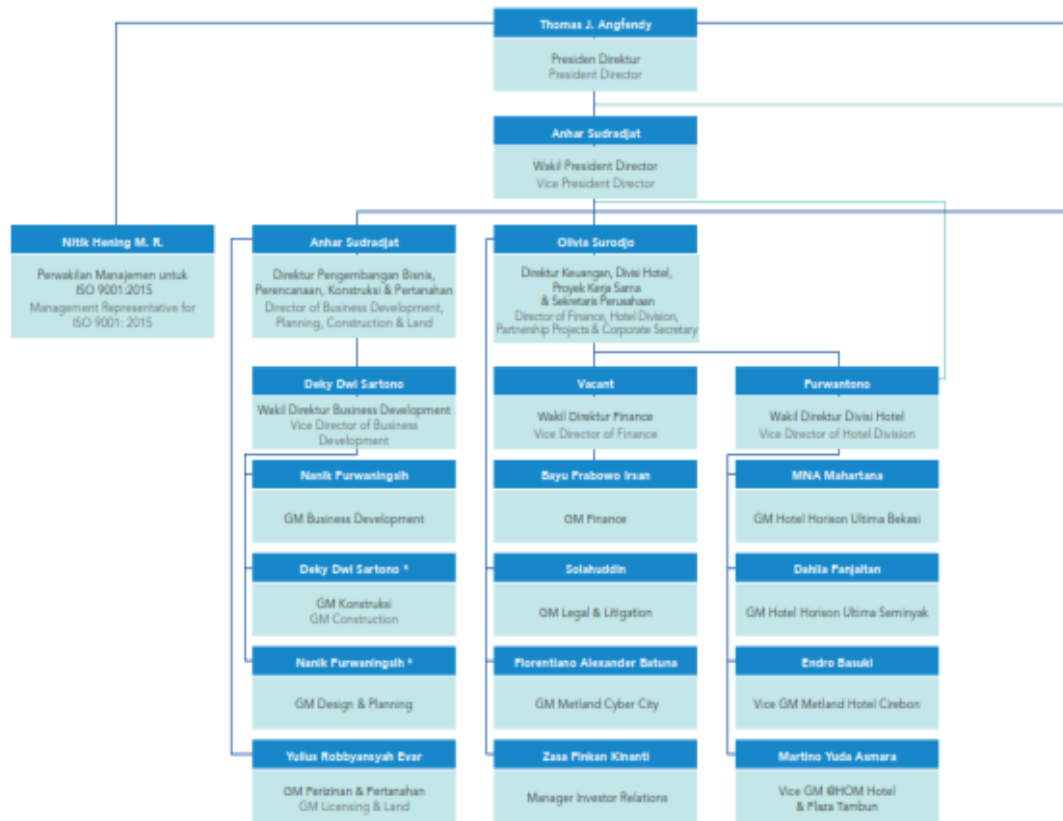
4.1.1 Gambaran Umum PT. Metropolitan Land (Metland) Tbk

Pada tahun 1970, tujuh pengusaha professional Indonesia Ir. Ismail Sofyan, Ir. Budi Brasali, Drs. Budiman Kusika, H. Subagja Prawata, Ir. Soekrisman, Ir. H. Secakusuma dan Ir. Ciputra sebagai pemimpin, bekerja sama membentuk sebuah perusahaan PT Metropolitan Development (MD). Ketujuh pendiri ini memiliki visi yang sama akan masa depan.

Berjalanya waktu MD berkembang pesat di berbagai bidang dan menjadi pemain yang aktif dalam dinamika pertumbuhan ibukota Indonesia pada saat itu. MD telah melahirkan banyak perusahaan besar pada masa kini, salah satunya adalah PT Metropolitan Land Tbk (Metland). Cikal bakal Metland merupakan bagian dari kisah sukses MD.

PT. Metropolitan Land Tbk. (Metland) dibentuk pada tanggal 16 Februari 1994 dan mulai beroperasi pada 28 Oktober 1994. Sejak berdirinya Metland focus pada bisnis pengembangan perumahan dan bangunan komersial. Kesuksesan Metland hari ini tidak lain adalah karena kepuasan konsumen, produk-produk kualitas, manajemen yang professional serta terjalinnya kerjasama yang baik di lingkungan anak perusahaan dan mitra bisnisnya. Sejak tahun 2004 perusahaan investasi Singapura yaitu Reco Newtown Pte. Ltd bergabung dalam perseroan, ini merupakan fakta bahwa meningkatnya kepercayaan dari para Stakeholder. Di Tahun yang sama Metland memperoleh sertifikat ISO 9001:2000, Sebuah pengakuan resmi atas system management mutu yang telah sesuai dengan standar internasional.

4.1.2 Struktur Organisasi PT. Metropolitan Land (Metland) Tbk



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Metropolitan Land (Metland) Tbk

4.2 Penerapan PSAK 46 pada Laporan Keuangan PT. Metropolitan Land (Metland) Tbk

Sebagaimana kita ketahui bahwa penerapan suatu PSAK akan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam penyajian laporan keuangan. Begitu pun dalam penerapan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan. Dapat dilihat dalam laporan keuangan PT. Metropolitan Land Tbk terdapat beban pajak penghasilan, asset pajak tangguhan, maupun liabilitas pajak tangguhan. Pos-pos tersebut merupakan pos-pos yang dibahas dalam PSAK 46 mengenai pajak penghasilan.

Berikut ini penerapan PSAK 46 pada PT. Metropolitan Land Tbk yang menerapkan PSAK 46 dengan mengakui adanya asset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada neraca, serta pajak kini dan pajak tangguhan (beban pajak penghasilan) pada laporan laba rugi.

Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk terdapat pos pajak dibayar dimuka (*prepaid tax*) pada bagian asset lancar. Dilihat dari perhitungan dibawah, besarnya pajak dibayar dimuka (*prepaid tax*) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp 4.338.003 dan Rp 15.968.773 (dalam jutaan).

Tabel 4.1 Pajak dibayar dimuka

Keterangan	2016	2015
Perseroan		
Pajak Penghasilan Badan		
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan Badan	7,095	
Pajak Pertambahan Nilai	4,330,908	15,968,773
Pajak Penjualan Barang Mewah		
	4,338,003	15,968,773

Pajak dibayar di muka ini merupakan pembayaran pajak yang berasal dari pembayaran atas Pajak Penghasilan Badan corporate Income Tax) dan Pajak Pertambahan Nilai (*value Added Tax*) entitas anak.

Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk terdapat pos pajak dibayar dimuka (*prepaid tax*) pada bagian asset lancar. Dilihat dari perhitungan dibawah, besarnya pajak dibayar dimuka (*prepaid tax*) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 18.043.879 dan Rp 24.546.583 (dalam jutaan).

Tabel 4.2 Pajak dibayar dimuka

Keterangan	2018	2017
Perseroan		
Pajak Penghasilan Badan	13,356,688	16,035,471
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan Badan		7,095
Pajak Pertambahan Nilai	4,687,191	8,504,017
Pajak Penjualan Barang Mewah		
	4,687,191	8,511,112
	18,043,879	24,546,583

Pajak dibayar di muka ini merupakan pembayaran pajak yang berasal dari pembayaran atas Pajak Penghasilan Badan corporate Income Tax) dan Pajak Pertambahan Nilai (*value Added Tax*) perseroan dan entitas anak.

Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk terdapat pos pajak dibayar dimuka (*prepaid tax*) pada bagian asset lancar. Dilihat dari perhitungan dibawah, besarnya pajak dibayar dimuka (*prepaid tax*) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 24.900.604 dan Rp 30.319.377 (dalam jutaan).

Tabel 4.3 Pajak dibayar dimuka

Keterangan	2020	2019
Perseroan		
Pajak Penghasilan Badan	20,990,950	25,550,323
Entitas Anak		
Pajak PPh 4 (2)	1,783,340	2,253,898
Pajak Pertambahan Nilai	2,126,314	2,515,156
Pajak Penjualan Barang Mewah		
	3,909,654	4,769,054
	24,900,604	30,319,377

4.2.1 Kebijakan Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan

Beberapa kebijakan akuntansi yang berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi

Sistem pengakuan penghasilan dan beban pada PT. Metropolitan Land Tbk (Metland) adalah accrual basis. Pendapatan usaha Pengembangan Perumahan dan Bangunan Komersial diakui pada saat kegiatan pelayanan jasa telah selesai dilakukan dan diterbitkan faktur perhitungannya. Kegiatan pelayanan jasa pada akhir periode yang belum diterbitkan nota tagihannya dicatat sebagai pendapatan yang masih harus diterima.

a. Penjualan dalam Perusahaan

Perusahaan dalam melakukan kegiatan Perusahaan pada saat ini adalah penjualan lahan komersil yang mencakup properti, rumah sakit, dan proyek residensial yang terletak di Jakarta & Jawa Barat.

Pengembangan Proyek Berjalan Urban City segmen usaha terbesar (109 %) bagi PT Metropolitan Land Tbk (MTL) Apartemen strata Kaliana Apartment di kawasan komersial Urban City di Metland Transyogi melakukan seremoni tutup atap pada 11 Agustus 2018 lalu. Dari 592 unit yang dipasarkan lebih dari 50% telah terjual. Pembangunan ini merupakan bagian dari rencana pengembangan empat menara apartemen di area tersebut dan saat ini sedang dalam tahap persiapan pemasaran menara kedua.

Metland terus melanjutkan pemasaran proyek residensial seperti Metland Menteng tengah mempersiapkan satu cluster baru yang akan dipasarkan pada September mendatang, demikian juga dengan Metland Cibitung dan Metland Transyogi. Proyek villa dan hotel prestisius yang dikembangkan oleh Metland, Royal Venya Ubud di Bali masih dalam tahap pemasaran unit. The Riviera at Puri, proyek cluster rumah tapak di lahan seluas 12 hektar kerjasama dengan Keppel Land sedang dalam persiapan pemasaran tahap ketiga setelah peluncuran unit pada tahap dua habis terjual.

b. Persediaan Dalam Perusahaan

Biaya perolehan persediaan terdiri dari pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lain sehubungan dengan diperolehnya persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini hingga diperoleh yaitu asset real estate.

c. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur konsumen, rabat dan cadangan lain yang serupa.

1) Penjualan Real Estate

Pendapatan dari penjualan real estate harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- a) Grup telah memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepemilikan real estate kepada pembeli;
 - b) Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang atau melakukan pengendalian efektif atas real estate yang dijual;
 - c) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal
 - d) Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Grup tersebut; dan
 - e) Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal
- 2) Pendapatan Usaha
- Pendapatan dari penjualan tanah kavling tanpa bangunan diakui dengan metode akrual penuh pada saat pengikatan jual beli, apabila seluruh kriteria terpenuhi:
- a) Jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli
 - b) Harga jual akan tertagih
 - c) Tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli
 - d) Penjual telah mengalihkan resiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berliabilitas atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.
- 3) Pendapatan Sewa
- a) Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
 - b) Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam buku akun pendapatan diterima dimuka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan periode kontrak sewa yang berlaku.
- 4) Pendapatan Bunga
- Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok dan tingkat bunga yang berlaku
- 5) Beban
- a) Biaya yang berhubungan dengan pendapatan yang menggunakan metode persentase penyelesaian diakui sesuai dengan tingkat persentase penyelesaian dari unit bangunan pada setiap akhir periode.

- b) Beban, kecuali yang berhubungan dengan pendapatan yang menggunakan metode persentase penyelesaian, diakui pada saat terjadinya.
- d. Liabilitas Imbalan Kerja
- 1) Imbalan Pasca-Kerja

Grup memberikan imbalan pasca-kerja imbalan pasti untuk karyawan berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Pada bulan September 2014, Grup mengikuti program pensiun untuk kompensasi pesangon dari DPLK Mandiri. Polis asuransi ini memenuhi syarat sebagai aset program imbalan pasca-kerja Grup.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode projected unit credit dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklas ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

 - a) Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
 - b) Beban atau pendapatan bunga neto.
 - c) Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

 - a) Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.
 - b) Liabilitas untuk pesangon diakui pada lebih awal ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

2) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa penghargaan masa kerja kepada karyawan yang memenuhi persyaratan. Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan menggunakan metode projected unit credit. Jumlah diakui sebagai provisi untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini provisi imbalan pasti.

3) Pajak Penghasilan

- a) Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.
- b) Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku
- c) Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.
- d) Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan
- e) Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.
- f) Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika

kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset tangguhan tersebut.

- g) Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

4.2.2 Penerapan Laporan Laba Rugi PT. Metropolitan Land Tbk (Metland) Tbk

Berikut akan ditampilkan laporan laba rugi dari PT Metropolitan Land Tbk. (MTL) untuk tahun 2015-2020

Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi PT Metropolitan Land Tbk Tahun 2016 dan 2015
PT Metropolitan Land Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

	2016	2015
Pendapatan Usaha	Rp 1,143,372,190	Rp 1,089,217,674
Beban pokok	Rp - 422,161,078	Rp - 428,731,934
Beban pemasaran	Rp - 64,596,634	Rp - 54,805,364
Beban umum dan administrasi	Rp - 190,633,026	Rp - 186,847,690
Pendapatan (Bersih) non usaha – bersih	Rp 4,647,659	Rp 30,163,292
Laba Rugi	Rp 470,629,111	Rp 388,669,394
Beban keuangan	Rp - 84,634,360	Rp 80,349,676
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	Rp - 1,336,854	Rp -
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan	Rp 555,263,471	Rp 308,319,718
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Kini	Rp 1,165,371	Rp 2,267,505
Tangguhan	Rp 4,218,158	Rp - 244,346
Laba Tahun Berjalan	Rp 560,647,000	Rp 310,342,877
Penghasilan Komprehensif Lainnya	Rp.	

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	Rp.	
Pengukuran kembali program imbalan pasti	Rp. - 7,234,474	Rp. - 1,345,528
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Rp. 553,412,526	Rp. 308,997,349
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Rp.	
Yang Dapat Diatribusikan kepada:	Rp.	
Pemilik entitas induk	Rp. 271,341,683	Rp. 214,269,500
Kepentingan non pengendali	Rp. 45,172,731	Rp. 25,713,107
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Rp. 316,514,414	Rp. 239,982,607
Laba Per Saham Dasar	Rp. 35	Rp. 28

Berdasarkan laporan laba rugi di atas, maka dapat dilihat bahwa laba sebelum pajak PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2016 sebesar Rp. 555.263.471 dalam ribuan sedangkan beban pajak kini sebesar Rp. 1.165.371 dalam ribuan sehingga menyebabkan terjadinya beban pajak tangguhan sebesar Rp. 4.218.158. Sehingga total laba bersih PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2016 sebesar Rp. 560.647.000.

Laba sebelum pajak PT. Metropolitan Land Tbk (Metland) pada tahun 2015 sebesar Rp. 308.319.718 dalam ribuan sedangkan beban pajak kini sebesar Rp. 2.267.505 dalam ribuan sehingga menyebabkan terjadinya beban pajak tangguhan sebesar Rp. -244.346. Sehingga total laba bersih PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2015 sebesar Rp. 310.342.877.

Tabel 4.5 Laporan Laba Rugi PT Metropolitan Land Tbk Tahun 2018 dan 2017
PT METROPOLITAN LAND Tbk

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

	2018	2017
Pendapatan Usaha	Rp. 1,378,861,622	Rp. 1,263,595,248
Beban pokok	Rp. - 530,443,388	Rp. - 446,599,656
Beban pemasaran	Rp. - 82,394,493	Rp. - 74,169,415
Beban umum dan administrasi	Rp. - 235,080,850	Rp. - 198,657,486
Pendapatan (Bersih) non usaha – bersih	Rp. 98,071,023	Rp. 126,935,741
Laba Rugi	Rp. 629,013,914	Rp. 671,104,432
Beban keuangan	Rp. - 74,688,369	Rp. - 66,146,442
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	Rp. - 14,051,926	Rp. - 7,377,647
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan	Rp. 540,273,619	Rp. 597,580,343
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Kini	Rp. 1,016,311	Rp. 650,461
Tangguhan	Rp. 55,745	Rp. 1,608,781
Laba Tahun Berjalan	Rp. 541,345,675	Rp. 599,839,585

Penghasilan Komprehensif Lainnya	Rp.		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	Rp.		
Pengukuran kembali program imbalan pasti	Rp.	4,416,131	Rp. - 13,807,475
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Rp.	545,761,806	Rp. 586,032,110
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Rp.		
Yang Dapat Diatribusikan kepada:	Rp.		
Pemilik entitas induk	Rp.	485,812,015	Rp. 438,220,952
Kepentingan non pengendali	Rp.	25,540,170	Rp. 99,300,933
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Rp.	511,352,185	Rp. 537,521,885
Laba Per Saham Dasar	Rp.	63	Rp. 59

Berdasarkan laporan laba rugi di atas, maka dapat dilihat bahwa laba sebelum pajak PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.378.861.622 dalam ribuan sedangkan beban pajak kini sebesar Rp. 1.016.311 dalam ribuan sehingga menyebabkan terjadinya beban pajak tangguhan sebesar Rp. 55.745. Sehingga total laba bersih PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2016 sebesar Rp. 541.345.675.

Laba sebelum pajak PT. Metropolitan Land Tbk (Metland) pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.263.595.248 dalam ribuan sedangkan beban pajak kini sebesar Rp. 650.461 dalam ribuan sehingga menyebabkan terjadinya beban pajak tangguhan sebesar Rp. 1.608.781, Sehingga total laba bersih PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2017 sebesar Rp. 599.839.585.

Tabel 4.6 Laporan Laba Rugi PT Metropolitan Land Tbk Tahun 2020 dan 2019

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

	2020	2019
Pendapatan Usaha	Rp. 1,110,650	Rp. 1,403,758
Beban pokok	Rp. - 524,906	Rp. - 613,036
Beban pemasaran	Rp. - 68,105	Rp. - 83,117
Beban umum dan administrasi	Rp. - 203,126	Rp. - 244,398
Pendapatan (Bersih) non usaha – bersih	Rp. 16,350	Rp. 102,035
Laba Rugi	Rp. 330,863	Rp. 565,242
Beban keuangan	Rp. - 23,418	Rp. - 38,993
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	Rp. - 3,820	Rp. - 8,293
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan	Rp. 303,625	Rp. 517,956
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Kini	Rp. 227	Rp. 2,018
Tangguhan	Rp. - 86	Rp. 822
Laba Tahun Berjalan	Rp. 303,766	Rp. 520,796
Penghasilan Komprehensif Lainnya	Rp.	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	Rp.	
Pengukuran kembali program imbalan pasti	Rp. - 7,231	Rp. - 4,680
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Rp. 296,535	Rp. 516,116

	2020	2019
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Rp.	
Yang Dapat Diatribusikan kepada:	Rp.	
Pemilik entitas induk	Rp. 265,368	Rp. 482,418
Kepentingan non pengendali	Rp. 13,971	Rp. 628
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Rp. 279,339	Rp. 483,046
Laba Per Saham Dasar	Rp. 36	Rp. 64

Berdasarkan laporan laba rugi di atas, maka dapat dilihat bahwa laba sebelum pajak PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.110.650 dalam jutaan sedangkan beban pajak kini sebesar Rp. -227 dalam jutaan sehingga menyebabkan terjadinya beban pajak tangguhan sebesar Rp. -86. Sehingga total laba bersih PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2020 sebesar Rp. 303.312.

Laba sebelum pajak PT. Metropolitan Land Tbk (Metland) pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.403.758 dalam jutaan sedangkan beban pajak kini sebesar Rp. -2.018 dalam jutaan sehingga menyebabkan terjadinya beban pajak tangguhan sebesar Rp. 822, Sehingga total laba bersih PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2019 sebesar Rp. 516.760.

Pada laporan laba rugi di atas, jelas terlihat bahwa laporan laba rugi PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk memiliki bentuk laporan *multiple step*, hal ini dibuktikan dimana pada laporan laba rugi tersebut di atas terdapat beban pajak, maka secara otomatis akan ada perkiraan laba sebelum pajak dan laba setelah pajak atau laba bersih. Di dalam laporan laba/rugi bentuk *multiple step*, pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain, demikian halnya dengan beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban lain-lain. Pendapatan dan beban disajikan pertama kemudian pendapatan dan beban lain-lain disajikan kemudian. *Multiple step* adalah laporan yang memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Laba operasional biasanya akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa.

1. Rekonsiliasi Fiskal

Laporan keuangan komersial yang berupa neraca dan laba rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diterima. Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi. Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya melalui rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang disebut rekonsiliasi Fiskal. Tahap awal yang dilakukan untuk merekonsiliasi laporan keuangan komersial adalah dengan

melakukan koreksi beda waktu/temporer. Beda waktu tersebut terdiri dari penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aset tak berwujud seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2015

No	Jenis	Tahun 2015		Beda Waktu
		Komersil	Fiskal	
1	Penyusutan aset tetap dan properti investasi	21,086,201	15,150,457	5,935,744
	Jumlah	21,086,201	15,150,457	5,935,744

Dari tabel di atas diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebelum dikoreksi sebesar Rp 21.086.201. Angka-angka tersebut didapat berdasarkan data laporan pajak penghasilan PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2015. Sedangkan setelah dilakukannya koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2015, diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan property investasi setelah dikoreksi menjadi sebesar Rp 15.150.457.

Pada hasil koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2015, maka dapat diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi yaitu sebesar Rp. 21.086.201

Pada penyusutan aktiva tetap terdapat perbedaan antara komersial dengan fiskal. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis aset tetap. Dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu positif yaitu menjadi Rp 5.935.744. Angka ini didapat berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersial dengan biaya fiskal.

Tabel 4.8 Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2016

No	Jenis	Tahun 2016		Beda Waktu
		Komersil	Fiskal	
1	Penyusutan aset tetap dan properti investasi	29,338,095	24,340,700	4,997,395
	Jumlah	29,338,095	24,340,700	4,997,395

Dari tabel di atas diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebelum dikoreksi sebesar Rp 29.338.095. Angka-angka tersebut didapat berdasarkan data laporan pajak penghasilan PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2016. Sedangkan setelah dilakukannya koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2016, diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan property investasi setelah dikoreksi menjadi sebesar Rp 24.340.700.

Pada hasil koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT.

Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2016, maka dapat diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi yaitu sebesar Rp. 29.338.095

Pada penyusutan aktiva tetap terdapat perbedaan antara komersial dengan fiskal. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis aset tetap. Dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu positif yaitu menjadi Rp 4.997.395. Angka ini didapat berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersial dengan biaya fiskal.

Tabel 4.9 Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2017

No	Jenis	Tahun 2017		Beda Waktu
		Komersil	Fiskal	
1	Penyusutan aset tetap dan properti investasi	32,989,407	27,053,663	5,935,744
	Jumlah	32,989,407	27,053,663	5,935,744

Dari tabel di atas diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebelum dikoreksi sebesar Rp 32.989.407. Angka-angka tersebut didapat berdasarkan data laporan pajak penghasilan PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2017. Sedangkan setelah dilakukannya koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2017, diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan property investasi setelah dikoreksi menjadi sebesar Rp 27.053.663.

Pada hasil koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2017, maka dapat diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi yaitu sebesar Rp. 32.989.407

Pada penyusutan aktiva tetap terdapat perbedaan antara komersial dengan fiskal. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis aset tetap. Dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu positif yaitu menjadi Rp 5.935.744. Angka ini didapat berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersial dengan biaya fiskal.

Tabel 4.10 Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2018

No	Jenis	Tahun 2018		Beda Waktu
		Komersil	Fiskal	
1	Penyusutan aset tetap dan properti investasi	34,737,152	29,879,182	4,857,970
	Jumlah	34,737,152	29,879,182	4,857,970

Dari tabel di atas diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebelum dikoreksi sebesar Rp 34.737.152. Angka-angka tersebut didapat berdasarkan data laporan pajak penghasilan PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2018. Sedangkan setelah dilakukannya koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun

2018, diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan property investasi setelah dikoreksi menjadi sebesar Rp 29.879.182.

Pada hasil koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2018, maka dapat diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi yaitu sebesar Rp. 34.737.152

Pada penyusutan aktiva tetap terdapat perbedaan antara komersial dengan fiskal. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis aset tetap. Dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu positif yaitu menjadi Rp 4.857.970. Angka ini didapat berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersil dengan biaya fiskal.

Tabel 4.11 Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2019

No	Jenis	Tahun 2019		Beda Waktu
		Komersil	Fiskal	
1	Penyusutan aset tetap dan properti investasi	36,087	32,212	3,875
	Jumlah	36,087	32,212	3,875

Dari tabel di atas diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebelum dikoreksi sebesar Rp 36.087 dalam jutaan. Angka-angka tersebut didapat berdasarkan data laporan pajak penghasilan PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2019. Sedangkan setelah dilakukannya koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2019, diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan property investasi setelah dikoreksi menjadi sebesar Rp 32.212 dalam jutaan.

Pada hasil koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2019, maka dapat diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi yaitu sebesar Rp. 36.087

Pada penyusutan aktiva tetap terdapat perbedaan antara komersial dengan fiskal. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis aset tetap. Dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu positif yaitu menjadi Rp 3.875 dalam jutaan. Angka ini didapat berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersil dengan biaya fiskal.

Tabel 4.12 Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2020

No	Jenis	Tahun 2020		Beda Waktu
		Komersil	Fiskal	
1	Penyusutan aset tetap dan properti investasi	37,183	33,366	3,817
	Jumlah	37,183	33,366	3,817

Dari tabel di atas diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebelum dikoreksi sebesar Rp 37.183 dalam jutaan. Angka-angka tersebut didapat berdasarkan data laporan pajak penghasilan PT. Metropolitan Land Tbk

(Metland), Tbk pada tahun 2020. Sedangkan setelah dilakukannya koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2020, diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan property investasi setelah dikoreksi menjadi sebesar Rp 33.366 dalam jutaan.

Pada hasil koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2020, maka dapat diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi yaitu sebesar Rp. 37.183

Pada penyusutan aktiva tetap terdapat perbedaan antara komersial dengan fiskal. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis aset tetap. Dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu positif yaitu menjadi Rp 3.817 dalam jutaan. Angka ini didapat berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersil dengan biaya fiskal.

4.3 Penerapan PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan PT. Metropolitan Land (Metland), Tbk

Dalam laporan laba ruginya pihak PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk telah mengakui adanya beban pajak tangguhan sebesar Rp 6.374.338 selama tahun 2015 hingga tahun 2020. Berdasarkan perhitungan pajak tangguhan yang dilakukan sesuai dengan prosedur penerapan PSAK No. 46, maka laporan keuangan PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk harus disesuaikan. dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diungkapkan oleh pihak perusahaan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari laporan pajak penghasilan fiskal.

Dalam catatan atas laporan pajak penghasilan, beban pajak perusahaan dapat dilihat dari laporan pajak penghasilan PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk. Setelah mengetahui jumlah penghasilan kena pajak maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan terhadap jumlah pajak kini yang ditanggung oleh perusahaan sebagai berikut:

Tabel 4.13 Perhitungan Pajak Kurang/Lebih Bayar PT. Pelindo I, Tbk Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2020

Penghasilan Kena Pajak	25% x 2.823.018.151
Beban Pajak Kini (25%)	7,057,545
PPh Dibayar Dimuka (Kredit Pajak)	
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 4 (2)	178,330
<input type="checkbox"/> PPN	212,630
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25	6,323,391
Total Kredit Pajak	6,362,487
PPh Lebih Bayar	734,154

Sumber : data diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat beban pajak kini yang ditanggung PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2020 sebesar Rp 7.057.545 (2.823.018.151 x 25%). Pada tahun 2020 perusahaan memiliki pajak dibayar di muka sebesar Rp 6.362.487 dalam ribuan yang dapat dikreditkan di akhir tahun. Dari perhitungan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk memiliki PPh lebih bayar sebesar Rp. 734.154 dalam ribuan.

Selanjutnya perhitungan kewajiban pajak tangguhan PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk pada tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kewajiban pajak tangguhan} &= \text{Tarif PPh Badan} \times \text{Jumlah beda temporer} \\ &= 25\% \times \text{Rp } 29.418,85 \\ &= \text{Rp } 73.547 \end{aligned}$$

Maka dengan demikian kewajiban pajak tangguhan PT. Metropolitan Land, Tbk pada tahun 2020 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Beban Pajak} &= \text{Pajak kini} + \text{Pajak tangguhan} \\ &= 734.154 - 73.547 \\ &= 660.607 \end{aligned}$$

Adapun jurnal penyajiannya yaitu:

Beban Pajak Tangguhan	.. 660.607
Kewajiban Pajak Tangguhan660.607

Berdasarkan laporan laba rugi PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2020 maka penyajian pajak tangguhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14 Penyajian Pajak Tangguhan PT. Pelindo I, Tbk
Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2020

Laba Sebelum Pajak	Rp. 2,823,018,015
Beban (Manfaat PPh) :	
<input type="checkbox"/> Pajak Kini	Rp. - 734,154
<input type="checkbox"/> Pajak Tangguhan	Rp. - 73,547
Total Laba Bersih	Rp. 2,822,210,314

Sumber : Laporan Keuangan PT. Metropolitan Land, Tbk 2020

Berdasarkan laporan laba rugi diatas, maka dapat dilihat bahwa laba sebelum pajak PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk selama tahun 2020 sebesar Rp. 2.823.018.015, sedangkan beban pajak kini sebesar Rp. 734.154, dan beban pajak tangguhan sebesar Rp. 73.547. Sehingga total laba bersih PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk tahun 2020 sebesar Rp. 2.822.210.314. Hasil ini berbeda dengan laba bersih yang tertera pada laporan laba rugi PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk yang mencantumkan laba bersih perusahaan sebesar Rp 2.823.018.015.

Selanjutnya dalam laporan neracanya, pihak PT. Pelindo I, Tbk telah mengakui adanya aset pajak tangguhan sebesar Rp 6.374.338 dan juga adanya Liabilitas pajak

tanggungan sebesar Rp 6.496.651. Angka ini tentunya harus disesuaikan kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam penerapan PSAK No 46 dan setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal. Berdasarkan PSAK No. 46, mengenai timbulnya perbedaan temporer yang apabila jumlah tersebut merupakan jumlah yang material maka perusahaan harus menghitung pajak tanggungan.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Penerapan PSAK 46 Pada Laporan Keuangan PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk

Dari hasil penelitian pada laporan laba rugi PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk maka dapat dinyatakan bahwa PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya (laporan laba rugi). Pada laporan laba rugi perusahaan, PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk memang telah mencantumkan dan mengakui adanya beban pajak tanggungan perusahaan sebesar Rp 660.607. Akan tetapi pada perhitungan dan penyajian pajak tanggungan setelah dilakukannya koreksi perbedaan temporer, terdapat perbedaan atas hasil laba bersih yang diperoleh perusahaan, pada laporan laba ruginya PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk mencantumkan laba bersih sebesar Rp 2.823.018.015, namun tetapi setelah dilakukan koreksi atas perbedaan temporer sebagaimana prosedur penerapan PSAK No. 46 maka diperoleh laba bersih perusahaan menjadi sebesar Rp 2.822.210.314.

4.4.2 Penerapan PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tanggungan Pada PT Metropolitan Land Tbk

Dari hasil penelitian pada laporan keuangan PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk mengenai penerapan PSAK No. 46 untuk pajak penghasilan khususnya mengenai pajak tanggungan dan penyajiannya dalam laporan keuangan selama periode 2020 berdasarkan prosedur yang dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk telah mengakui semua konsekuensi atas pajak di masa kini dan masa yang akan datang. Akan tetapi pada perhitungan dan penyajian pajak tanggungan perusahaan, terdapat perbedaan antara selisih laba bersih yang diperoleh perusahaan. Hal ini berarti bahwa prosedur yang dijalankan oleh pihak PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk terhadap PSAK No 46 belum sepenuhnya diterapkan pada laporan keuangannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk adalah salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang Pengembangan Bangunan dan Perumahan Komersial di Indonesia yang tidak dikecualikan dalam penerapan PSAK No. 46 mengenai pajak tangguhan juga wajib diterapkan. Dalam pelaksanaannya PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya.
2. Dengan diakuinya konsekuensi pajak di masa yang akan datang atau pajak tangguhan sebagai akibat dari perbedaan temporer yang terjadi, maka laporan keuangan PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk belum sepenuhnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Setelah dilakukan koreksi atas perbedaan temporer sebagaimana prosedur penerapan PSAK No. 46 dalam hal perhitungan pajak tangguhan masih terdapat perbedaan dengan hasil diperoleh dibandingkan dengan hasil yang tertera pada laporan keuangan perusahaan, baik pada laporan keuangan laba rugi maupun laporan keuangan neraca.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu:

1. PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk harus benar-benar memperhatikan setiap dampak dari perhitungan perpajakan tidak hanya pada laporan laba rugi, tetapi juga dalam pengakuan di laporan neraca. Maka dari itu, perlunya memberikan pelatihan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Tangguhan kepada staf bagian akuntansi dan pajak, mengingat penerapannya yang kompleks dan diperlukan pemahaman yang mendalam, walaupun pada awal penerapan PSAK No. 46 terkesan rumit.
2. PT. Metropolitan Land Tbk (Metland), Tbk harus benar-benar memperhatikan setiap kebijakan agar dapat memecahkan masalah pada perusahaan terhadap laporan keuangan agar dapat melakukan penyajian dan pelaporan laporan keuangan sesuai PSAK 46 yang telah diatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Hery. (2015). *Analisis laporan keuangan. Edisi kesatu. Yogyakarta: center for academic publishing services.*
- Direktorat Jenderal Pajak, (2016) *susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan.*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (Pajak Penghasilan).*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (Pajak Penghasilan).*
- _____. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Penyajian Laporan Keuangan).*
- _____. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (Pajak Penghasilan).*
- _____. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (Laporan Keuangan Konsolidasian).*
- _____. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 65 (Laporan Keuangan Konsolidasian).*
- _____. (2014). *Standar Akuntansi Keuangan Per efektif 1 Januari 2014.*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (Pajak Penghasilan).*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 65 (Laporan Keuangan Konsolidasian).*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Per efektif 1 Januari 2018.*
- Mansyur, Windy N. (2012). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan PT Prima Karya Manunggal.* Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Mulyadi, Muhammad. (2019). *Analisis Penerapan PSAK 46 Atas Entitas Non Jasa Konstruksi pada Kelompok Usaha PT Wijaya Karya (Persero) TBK yang Disajikan pada Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 2015-2017.* Skripsi. Universitas Pakuan.
- Permatasari, Riza. (2020). *Implementasi PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.* Skripsi. Universitas Pakuan.
- Prawita, Anisya O. (2013). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Penghitungan PPh Terutang Pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk.* Skripsi. Universitas Pakuan.

- Razzaq, A. (2018). *Analisis Pengaruh Revisi PSAK 46 (Pajak Penghasilan) Terhadap Kesesuaian Penyajian Pelaporan Keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Periode 2012-2016*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Saputra, Budi R. (2016). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Tangguhan Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak. Edisi ke enam*. Jakarta: Salemba Empat
- Maimunah, S. (2016). *Analisis Penerapan Prinsip Penyajian dan Pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Tentang Kombinasi Bisnis pada Laporan Keuangan PT Telekomunikasi (Persero) Tbk*. Jurnal, [online] Volume 2(1), p. 1. Tersedia di: <https://journal.unpak.ac.id/> [Diakses pada 11 Mei 2019].
- Awusi, Lucrecia F. (2011). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. Usaha Putri Poso*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Cendra, I. (2012). *Analisis Penerapan PSAK No.46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Di PT UG*. Thesis. Universitas Bina Nusantara.
- Putra, Dwi A. C. (2016). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT MNC Sky Vision KPP Malang*. Jurnal, [online] Volume xx, p. 1. Tersedia di: ejournal.unikama.ac.id [Diakses pada 11 November 2018]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinny Dwi Ismutria Pratiwi
Alamat : Komplek Kehutanan Bondongan RT 01/07 Kota Bogor Selatan
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 16 September 1996
Umur : 26 Tahun
Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Bondongan 4 Bogor
- SMP : SMP Rimba Teruna Bogor
- SMA : SMA Negeri 4 Kota Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, April 2022
Peneliti,

(Dinny Dwi Ismutria Pratiwi)

LAMPIRAN

Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,		1 Januari 2014/ 31 Desember 2013/ January 1, 2014/ December 31, 2013 *)		
	2015 Rp '000	2014 *) Rp '000	December 31, 2013 *) Rp '000		
ASET				ASSETS	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS	
Kas dan setara kas	5	216.358.346	302.173.032	382.391.421	Cash and cash equivalents
Piutang usaha kepada pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.061.031 ribu tahun 2015, Rp 4.646.422 ribu tahun 2014 dan Rp 5.061.145 ribu tahun 2013	6	224.864.840	324.037.076	158.314.949	Trade accounts receivable from third parties - net of allowance for impairment losses of Rp 1,061,031 thousand in 2015, Rp 4,646,422 thousand in 2014 and Rp 5,061,145 thousand in 2013
Piutang lain-lain					Other accounts receivable
Pihak berelasi	33	112.317	36.781	353.663	Related parties
Pihak ketiga		4.246.412	5.728.843	3.005.970	Third parties
Persediaan					Inventories
Aset real estat	10	1.500.140.509	1.174.972.421	885.958.855	Real estate assets
Lain-lain		2.504.944	2.131.632	1.853.673	Others
Pajak dibayar dimuka	7	15.968.773	4.064.586	5.636	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	8	47.894.976	34.543.374	35.769.094	Advances and prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		<u>2.012.091.117</u>	<u>1.847.687.745</u>	<u>1.467.653.261</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NONCURRENT ASSETS
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga		586.092	1.395.560	2.220.173	Other accounts receivable from third parties
Aset keuangan lainnya	9	58.896.967	62.862.510	44.576.601	Other financial assets
Uang muka pembelian tanah		7.434.980	13.017.535	46.088.711	Advance for purchase of land
Persediaan aset real estat	10	184.749.170	194.796.157	280.538.240	Real estate assets inventories
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 180.333.206 ribu tahun 2015, Rp 159.247.005 ribu tahun 2014 dan Rp 139.923.224 ribu tahun 2013	11	980.970.758	807.956.399	763.323.675	Investment properties - net of accumulated depreciation of Rp 180,333,206 thousand in 2015, Rp 159,247,005 thousand in 2014 and Rp 139,923,224 thousand in 2013
Aset pajak tangguhan	30	3.401.222	1.936.107	632.216	Deferred tax assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 144.520.046 ribu tahun 2015, Rp 123.753.739 ribu tahun 2014 dan Rp 108.848.897 ribu tahun 2013	12	363.937.545	315.779.153	226.561.784	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 144,520,046 thousand in 2015, Rp 123,753,739 thousand in 2014 and Rp 108,848,897 thousand in 2013
Aset lain-lain		8.674.727	5.446.344	3.008.717	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>1.608.651.461</u>	<u>1.403.189.765</u>	<u>1.366.950.117</u>	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET		<u><u>3.620.742.578</u></u>	<u><u>3.250.877.510</u></u>	<u><u>2.834.603.378</u></u>	TOTAL ASSETS

*) Disajikan kembali (Catatan 2)

*) As restated (Note 2)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. METROPOLITAN LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015 DAN 2014
DARI JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013 (Lanjutan)

PT. METROPOLITAN LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2015 AND 2014
AND JANUARY 1, 2014/DECEMBER 31, 2013 (Continued)

Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,		1 Januari 2014/ 31 Desember 2013/ January 1, 2014/ December 31, 2013 *)		
	2015 Rp '000	2014 *) Rp '000	Rp '000		
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank jangka pendek	13	264.999.998	310.999.998	199.999.999	Short-term bank loans
Utang usaha kepada pihak ketiga	14	28.342.254	38.631.652	94.266.885	Trade accounts payable to third parties
Utang lain-lain					Other accounts payable
Pihak berelasi	33	463.389	259.750	273.309	Related parties
Pihak ketiga	15	150.965.369	61.483.315	77.623.032	Third parties
Utang pajak	16	52.371.362	48.797.048	31.479.452	Taxes payable
Beban akrual		21.707.740	17.914.455	12.939.485	Accrued expenses
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					Current maturities of long-term liabilities
Utang lain-lain	15	-	36.945.695	-	Other accounts payable
Utang bank	17	180.850.000	87.750.000	77.000.000	Bank loans
Pendapatan diterima dimuka dan uang muka penjualan - bagian yang direalisasi dalam satu tahun	18	167.158.614	149.293.671	153.383.572	Unearned revenue and sales advances - realizable within one year
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		866.858.726	752.075.584	646.965.734	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	17	482.558.509	415.658.536	365.264.014	Long-term bank loans - net of current maturities
Pendapatan diterima dimuka dan uang muka penjualan - setelah dikurangi bagian yang direalisasi dalam satu tahun	18	16.240.527	23.038.592	14.987.271	Unearned revenue and sales advances - net of amount realizable within one year
Uang jaminan pelanggan		20.035.661	14.258.079	9.434.589	Customers' deposits
Utang lain-lain kepada pihak ketiga		-	-	24.214.443	Other accounts payable to third parties
Liabilitas pajak tangguhan	30	1.181.101	-	-	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan pasca-kerja	32	20.651.329	14.914.816	10.238.139	Post-employment benefits obligation
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		540.667.127	467.870.023	424.138.456	Total Noncurrent Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		1.407.525.853	1.219.945.607	1.071.104.190	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham					Capital stock - Rp 100 par value per share
Modal dasar - 20.000.000.000 saham					Authorized capital - 20,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 7.655.126.330 saham pada tahun 2015 dan 7.579.333.000 saham pada tahun 2014 dan 2013	19	765.512.633	757.933.300	757.933.300	Issued and paid-in capital - 7,655,126,330 shares in 2015 and 7,579,333,000 shares in 2014 and 2013
Tambahan modal disetor	20	257.963.521	237.878.288	237.878.288	Additional paid-in capital
Opsi saham		-	-	2.895.126	Stock options
Komponen ekuitas lainnya		2.895.126	2.895.126	-	Other equity component
Penghasilan komprehensif lain		(5.063.290)	(3.737.491)	1.472.968	Other comprehensive income
Saldo laba - sejak kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2004					Retained earnings - since quasi-reorganization on December 31, 2004
Ditentukan penggunaannya	21	7.000.000	5.000.000	3.000.000	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		1.081.840.541	931.342.605	714.383.979	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		2.110.148.531	1.931.311.828	1.717.563.661	Equity attributable to the Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	22	103.068.194	99.620.075	45.935.527	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		2.213.216.725	2.030.931.903	1.763.499.188	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.620.742.578	3.250.877.510	2.834.603.378	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan kembali (Catatan 2)

*) As restated (Note 2)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. M TROPOLITA LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK
 L PORA LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
 LAIN KONSOLIDASIAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

PT. METROPOLITAN LAND Tb AND ITS SUBSIDIARIES
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
 AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014

	Catatan/ Notes	2015 Rp '000	2014 *) Rp '000	
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA	23	1.089.217.674	1.117.732.408	SALES AND REVENUES
BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN	24	428.731.938	469.266.563	DIRECT COSTS AND COST OF SALES
LABA BRUTO		660.485.736	648.465.845	GROSS PROFIT
Beban pemasaran	25	(54.805.364)	(47.275.182)	Marketing expenses
Beban administrasi	26	(186.847.690)	(168.472.133)	Administrative expenses
Beban pajak final	29	(66.313.948)	(63.207.155)	Final tax expense
Penghasilan bunga		9.765.072	14.708.212	Interest income
Beban keuangan	27	(80.349.676)	(67.363.968)	Finance cost
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih	28	(39.928.364)	(1.248.124)	Other gains (losses) - net
LABA SEBELUM PAJAK		242.005.766	315.607.495	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK - BERSIH	30	(2.023.159)	(6.113.783)	TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		239.982.607	309.493.712	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK				OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF TAX
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengkukuran kembali atas program imbangan pasti		(1.345.528)	(5.224.672)	Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss Remeasurement of defined benefit obligation
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>238.637.079</u>	<u>304.269.040</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		214.269.500	268.224.291	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	22	25.713.107	41.269.421	Non-controlling interests
Jumlah		<u>239.982.607</u>	<u>309.493.712</u>	Total
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		212.943.701	263.013.832	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		25.693.378	41.255.208	Non-controlling interests
Jumlah		<u>238.637.079</u>	<u>304.269.040</u>	Total
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	31	28,16	35,39	BASIC EARNINGS PER SHARE (Full amount in Rupiah)

*) Disajikan kembali (Catatan 2)

*) As restated (Note 2)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. METROPOLITAN LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 D SEMBER 2016 DA 2015

PT. METROPOLITAN LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 AND 2015

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,		
		2016 Rp '000	2015 Rp '000	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	310.437.081	216.358.346	Cash and cash equivalents
Piutang usaha kepada pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.226.592 ribu tahun 2016 dan Rp 1.061.031 ribu tahun 2015	6	187.118.481	224.864.840	Trade accounts receivable from third parties - net of allowance for impairment losses of Rp 1,226,592 thousand in 2016 and Rp 1,061,031 thousand in 2015
Piutang lain-lain				Other accounts receivable
Pihak berelasi	34	29.081	112.317	Related parties
Pihak ketiga		7.360.771	4.246.412	Third parties
Persediaan				Inventories
Aset real estat	10	1.623.294.158	1.500.140.509	Real estate assets
Lain-lain		2.689.337	2.504.944	Others
Pajak dibayar dimuka	7	4.338.003	15.968.773	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	8	37.254.278	47.894.976	Advances and prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		<u>2.172.521.190</u>	<u>2.012.091.117</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga		1.244.516	586.092	Other accounts receivable from third parties
Aset keuangan lainnya	9	59.991.797	58.896.967	Other financial assets
Uang muka pembelian tanah		8.609.580	7.434.980	Advance for purchase of land
Persediaan aset real estat	10	201.320.578	184.749.170	Real estate assets inventories
Investasi ventura bersama	11	51.222.904	-	Investment in joint venture
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 209.671.301 ribu tahun 2016 dan Rp 180.333.206 ribu tahun 2015	12	1.038.518.132	980.970.758	Investment properties - net of accumulated depreciation of Rp 209,671,301 thousand in 2016 and Rp 180,333,206 thousand in 2015
Aset pajak tangguhan	31	260.886	3.401.222	Deferred tax assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 174.649.786 ribu tahun 2016 dan Rp 144.520.046 ribu tahun 2015	13	387.873.153	363.937.545	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 174,649,786 thousand in 2016 and Rp 144,520,046 thousand in 2015
Aset lain-lain		10.966.537	8.674.727	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>1.760.008.083</u>	<u>1.608.651.461</u>	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET		<u><u>3.932.529.273</u></u>	<u><u>3.620.742.578</u></u>	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. METROPOLITAN LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 D SEMBER 2016 DA 2015 (Lanjutan)

PT. METROPOLITAN LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 (Continued)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,			
		2016 Rp '000	2015 Rp '000		
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES	
Utang bank jangka pendek	14	309.500.000	264.999.998	Short-term bank loans	
Utang usaha kepada pihak ketiga	15	18.172.986	28.342.254	Trade accounts payable to third parties	
Utang lain-lain				Other accounts payable	
Pihak berelasi	34	506.145	463.389	Related parties	
Pihak ketiga	16	41.585.040	150.965.369	Third parties	
Utang pajak	17	51.826.805	52.371.362	Taxes payable	
Beban akrual		21.183.160	21.707.740	Accrued expenses	
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	18	207.111.111	180.850.000	Current maturities of long-term bank loans	
Pendapatan diterima dimuka dan uang muka penjualan - bagian yang direalisasi dalam satu tahun	19	187.394.053	167.158.614	Unearned revenue and sales advances - realizable within one year	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		837.279.300	866.858.726	Total Current Liabilities	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES	
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	18	503.735.514	482.558.509	Long-term bank loans - net of current maturities	
Pendapatan diterima dimuka dan uang muka penjualan - setelah dikurangi bagian yang direalisasi dalam satu tahun	19	27.157.903	16.240.527	Unearned revenue and sales advances - net of amount realizable within one year	
Uang jaminan pelanggan		25.833.977	20.035.661	Customers' deposits	
Liabilitas pajak tangguhan	31	2.006.527	1.181.101	Deferred tax liabilities	
Liabilitas imbalan pasca-kerja	33	34.113.522	20.651.329	Post-employment benefits obligation	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		592.847.443	540.667.127	Total Noncurrent Liabilities	
JUMLAH LIABILITAS		1.430.126.743	1.407.525.853	TOTAL LIABILITIES	
EKUITAS				EQUITY	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity attributable to the Owners of the Company	
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				Capital stock - Rp 100 par value per share	
Modal dasar - 20.000.000.000 saham				Authorized capital - 20,000,000,000 shares	
Modal ditempatkan dan disetor - 7.655.126.330 saham	20	765.512.633	765.512.633	Issued and paid-in capital - 7,655,126,330 shares	
Tambahan modal disetor	21	257.963.521	257.963.521	Additional paid-in capital	
Komponen ekuitas lainnya		2.895.126	2.895.126	Other equity component	
Penghasilan komprehensif lain		(12.268.278)	(5.063.290)	Other comprehensive income	
Saldo laba - sejak kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2004				Retained earnings - since quasi-reorganization on December 31, 2004	
Ditentukan penggunaannya	22	9.000.000	7.000.000	Appropriated	
Tidak ditentukan penggunaannya		1.326.685.820	1.081.840.541	Unappropriated	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		2.349.788.822	2.110.148.531	Equity attributable to the Owners of the Company	
Kepentingan nonpengendali	23	152.613.708	103.068.194	Non-controlling interests	
Jumlah Ekuitas		2.502.402.530	2.213.216.725	Total Equity	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.932.529.273	3.620.742.578	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. M TROPOLITAN LA D Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015

PT. METROPOLITAN LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015

	Catatan/ Notes	2016 Rp '000	2015 Rp '000	
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA	24,34	1.143.372.190	1.089.217.674	SALES AND REVENUES
BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN	25	422.161.078	428.731.938	DIRECT COSTS AND COST OF SALES
LABA BRUTO		721.211.112	660.485.736	GROSS PROFIT
Beban pemasaran	26	(64.596.634)	(54.805.364)	Marketing expenses
Beban administrasi	27	(190.633.026)	(186.847.690)	Administrative expenses
Bagian rugi ventura bersama	11	(1.336.854)	-	Share in net loss of joint venture
Beban pajak final	30	(62.759.954)	(66.313.948)	Final tax expense
Penghasilan bunga		9.521.672	9.765.072	Interest income
Beban keuangan	28	(84.634.360)	(80.349.676)	Finance cost
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih	29	(4.874.013)	(39.928.364)	Other gains (losses) - net
LABA SEBELUM PAJAK		321.897.943	242.005.766	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK - BERSIH	31	(5.383.529)	(2.023.159)	TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		316.514.414	239.982.607	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK				OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF TAX
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(7.234.474)	(1.345.528)	Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss: Remeasurement of defined benefit obligation
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>309.279.940</u>	<u>238.637.079</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		271.341.683	214.269.500	Owners of the Company
Keperluan nonpengendali	23	45.172.731	25.713.107	Non-controlling interests
Jumlah		<u>316.514.414</u>	<u>239.982.607</u>	Total
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		264.136.695	212.943.701	Owners of the Company
Keperluan Nonpengendali		45.143.245	25.693.378	Non-controlling interests
Jumlah		<u>309.279.940</u>	<u>238.637.079</u>	Total
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN				BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE
(Dalam Rupiah penuh)	32	35,45	28,16	(Full amount in Rupiah)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. METROPOLITAN LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 D SEMBER 2017 DA 2016

PT. METROPOLITAN LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2017 AND 2016

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,		
		2017	2016	
		Rp '000	Rp '000	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	462.939.490	310.437.081	Cash and cash equivalents
Piutang usaha kepada pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.164.382 ribu tahun 2017 dan Rp 1.226.592 ribu tahun 2016	6	310.364.953	187.118.481	Trade accounts receivable from third parties - net of allowance for impairment losses of Rp 1,164,382 thousand in 2017 and Rp 1,226,592 thousand in 2016
Piutang lain-lain				Other accounts receivable
Pihak berelasi	34	29.081	29.081	Related party
Pihak ketiga		9.755.952	7.360.771	Third parties
Persediaan				Inventories
Aset real estat	10	1.700.394.571	1.623.294.158	Real estate assets
Lain-lain		2.638.735	2.689.337	Others
Pajak dibayar dimuka	7	8.511.112	4.338.003	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	8	50.402.057	37.254.278	Advances and prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		<u>2.545.035.951</u>	<u>2.172.521.190</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga		3.660.726	1.244.516	Other accounts receivable from third parties
Aset keuangan lainnya	9	169.964.970	59.991.797	Other financial assets
Uang muka pembelian tanah		91.681.674	8.609.580	Advance for purchase of land
Persediaan aset real estat	10	278.918.180	201.320.578	Real estate assets inventories
Investasi ventura bersama	11	284.687.807	51.222.904	Investment in joint venture
Aset pajak tangguhan	31	247.093	260.886	Deferred tax assets
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 240.771.805 ribu tahun 2017 dan Rp 209.671.301 ribu tahun 2016	12	1.105.608.755	1.038.518.132	Investment properties - net of accumulated depreciation of Rp 240,771,805 thousand in 2017 and Rp 209,671,301 thousand in 2016
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 206.667.495 ribu tahun 2017 dan Rp 174.649.786 ribu tahun 2016	13	372.557.658	387.873.153	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 206,667,495 thousand in 2017 and Rp 174,649,786 thousand in 2016
Aset lain-lain		<u>21.467.362</u>	<u>10.966.537</u>	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>2.328.794.225</u>	<u>1.760.008.083</u>	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET		<u>4.873.830.176</u>	<u>3.932.529.273</u>	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. METROPOLITAN LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 D SEMBER 2017 DA 2016 (Lanjutan)

PT. METROPOLITAN LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2017 AND 2016 (Continued)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,		
		2017 Rp '000	2016 Rp '000	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	14	319.502.534	309.500.000	Short-term bank loans
Utang usaha kepada pihak ketiga	15	44.340.019	18.172.986	Trade accounts payable to third parties
Utang lain-lain				Other accounts payable
Pihak berelasi	34	497.363	506.145	Related parties
Pihak ketiga	16	38.542.688	41.585.040	Third parties
Utang pajak	17	66.927.615	51.826.805	Taxes payable
Beban akrual		24.013.162	21.183.160	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	18	242.666.667	207.111.111	Current maturities of long-term bank loans
Pendapatan diterima dimuka dan uang muka penjualan - bagian yang direalisasi dalam satu tahun	19	274.058.960	187.394.053	Unearned revenue and sales advances - realizable within one year
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>1.010.549.008</u>	<u>837.279.300</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	18	627.023.986	503.735.514	Long-term bank loans - net of current maturities
Pendapatan diterima dimuka dan uang muka penjualan - setelah dikurangi bagian yang direalisasi dalam satu tahun	19	61.975.850	27.157.903	Unearned revenue and sales advances - net of amount realizable within one year
Utang jaminan pelanggan		28.935.898	25.833.977	Customers' deposits
Utang jaminan ventura bersama	36h	90.527.505	-	Joint venture's deposit
Liabilitas pajak tangguhan	31	3.250.480	2.006.527	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan pasca-kerja	33	52.215.203	34.113.522	Post-employment benefits obligation
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>863.928.922</u>	<u>592.847.443</u>	Total Noncurrent Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>1.874.477.930</u>	<u>1.430.126.743</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity attributable to the Owners of the Company
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				Capital stock - Rp 100 par value per share
Modal dasar - 20.000.000.000 saham				Authorized capital - 20,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 7.655.126.330 saham	20	765.512.633	765.512.633	Issued and paid-in capital - 7,655,126,330 shares
Tambahan modal disetor	21	257.963.521	257.963.521	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lainnya		2.895.126	2.895.126	Other equity component
Penghasilan komprehensif lain		(25.725.017)	(12.268.278)	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
Ditetapkan penggunaannya	22	11.000.000	9.000.000	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		1.735.791.342	1.326.685.820	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		<u>2.747.437.605</u>	<u>2.349.788.822</u>	Equity attributable to the Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	23	<u>251.914.641</u>	<u>152.613.708</u>	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		<u>2.999.352.246</u>	<u>2.502.402.530</u>	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>4.873.830.176</u>	<u>3.932.529.273</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. M TROPOLITAN LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT. METROPOLITAN LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2017 AND 2016

	Catatan/ Notes	2017 Rp '000	2016 Rp '000	
Penjualan dan Pendapatan Usaha	24,34	1.263.595.248	1.143.372.190	SALES AND REVENUES
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan	25	446.599.656	422.161.078	DIRECT COSTS AND COST OF SALES
LABA BRUTO		816.995.592	721.211.112	GROSS PROFIT
Beban pemasaran	26	(72.597.346)	(64.596.634)	Marketing expenses
Beban administrasi	27	(198.222.503)	(190.633.026)	Administrative expenses
Bagian laba (rugi) ventura bersama	11	112.330.003	(1.336.854)	Share in net profit (loss) of joint venture
Beban pajak final	30	(57.181.114)	(62.759.954)	Final tax expense
Penghasilan bunga		11.071.974	9.521.672	Interest income
Beban keuangan	28	(66.146.442)	(84.634.360)	Finance cost
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih	29	7.019.863	(4.874.013)	Other gains (losses) - net
LABA SEBELUM PAJAK		553.270.027	321.897.943	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK - BERSIH	31	(2.259.242)	(5.383.529)	TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		551.010.785	316.514.414	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK				OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF TAX
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengkukuran kembali atas program imbalan pasti		(13.488.900)	(7.234.474)	Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss: Remeasurement of defined benefit obligation
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH DIKURANGI PAJAK		<u>537.521.885</u>	<u>309.279.940</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR NET OF TAX
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		451.677.691	271.341.683	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	23	99.333.094	45.172.731	Non-controlling interests
Jumlah		<u>551.010.785</u>	<u>316.514.414</u>	Total
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		438.220.952	264.136.695	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		99.300.933	45.143.245	Non-controlling interests
Jumlah		<u>537.521.885</u>	<u>309.279.940</u>	Total
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (Dalam Rupiah penuh)	32	59,00	35,45	BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE (Full amount in Rupiah)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. METROPOLITAN LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MAR 2018 D 31 DESEMBER 2017

PT. METROPOLITAN LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
MARCH 31, 2018 AND DECEMBER 31, 2017

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2018 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	564,637,130	462,939,490	Cash and cash equivalents
Piutang usaha kepada pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.123.570 ribu pada 31 Maret 2018 dan Rp 1.164.382 ribu pada 31 Desember 2017	6	157,497,489	310,364,953	Trade accounts receivable from third parties - net of allowance for impairment losses of Rp 1,123,570 thousand in March 31, 2018 and Rp 1,164,382 thousand in December 31, 2017
Piutang lain-lain				Other accounts receivable
Pihak berelasi	34	6,788	29,081	Related parties
Pihak ketiga		10,918,806	9,755,952	Third parties
Persediaan				Inventories
Aset real estat	10	1,602,560,877	1,700,394,571	Real estate assets
Lain-lain		2,427,301	2,638,735	Others
Pajak dibayar dimuka	7	5,934,357	8,511,112	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	8	62,099,359	50,402,057	Advances and prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		<u>2,406,082,107</u>	<u>2,545,035,951</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga		3,638,685	3,660,726	Other accounts receivable from third parties
Aset keuangan lainnya	9	144,374,157	169,964,970	Other financial assets
Uang muka pembelian tanah		61,828,078	91,681,674	Advance for purchase of land
Persediaan aset real estat	10	437,919,437	278,918,180	Real estate assets inventories
Investasi ventura bersama	11	282,396,379	284,687,807	Investment in joint venture
Uang muka investasi ventura bersama		7,501,500	-	Advance for investment in joint venture
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 249.410.578 ribu pada 31 Maret 2018 dan Rp 240.771.805 ribu pada 31 Desember 2017	12	1,101,535,194	1,105,608,755	Investment properties - net of accumulated depreciation of Rp 249,410,578 thousand in March 31, 2018 and Rp 240,771,805 thousand in December 31, 2017
Aset pajak tangguhan	31	313,818	247,093	Deferred tax assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 215.338.734 ribu pada 31 Maret 2018 dan Rp 206.667.495 ribu pada 31 Desember 2017	13	366,324,165	372,557,658	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 215,338,734 thousand in March 31, 2018 and Rp 206,667,495 thousand in December 31, 2016
Aset lain-lain		<u>21,571,245</u>	<u>21,467,362</u>	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>2,427,402,658</u>	<u>2,328,794,225</u>	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET		<u><u>4,833,484,765</u></u>	<u><u>4,873,830,176</u></u>	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. METROPOLITAN LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MAR 2018 D 31 DESEMBER 2017

PT. METROPOLITAN LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
MARCH 31, 2018 AND DECEMBER 31, 2017

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2018 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	14	115,000,000	319,502,534	Short-term bank loans
Utang usaha kepada pihak ketiga	15	17,674,288	44,340,019	Trade accounts payable to third parties
Utang lain-lain				Other accounts payable
Pihak berelasi	34	446,908	497,363	Related parties
Pihak ketiga	16	35,445,146	38,542,688	Third parties
Utang pajak	17	25,239,075	66,927,615	Taxes payable
Beban akrual		22,981,237	24,013,162	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	18	188,333,333	242,666,667	Current maturities of long-term bank loans
Pendapatan diterima dimuka dan uang muka penjualan - bagian yang direalisasi dalam satu tahun	19	229,290,133	274,058,960	Unearned revenue and sales advances - realizable within one year
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		634,410,120	1,010,549,008	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	18	827,883,948	627,023,986	Long-term bank loans - net of current maturities
Pendapatan diterima dimuka dan uang muka penjualan - setelah dikurangi bagian yang direalisasi dalam satu tahun	19	64,925,719	61,975,850	Unearned revenue and sales advances - net of amount realizable within one year
Uang jaminan pelanggan		27,789,210	28,935,898	Customers' deposits
Uang jaminan ventura bersama	36h	120,588,646	90,527,505	Joint venture's deposit
Liabilitas pajak tangguhan	31	3,415,310	3,250,480	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan pasca-kerja	33	56,873,270	52,215,203	Post-employment benefits obligation
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1,101,476,103	863,928,922	Total Noncurrent Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		1,735,886,223	1,874,477,930	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity attributable to the Owners of the Company
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				Capital stock - Rp 100 par value per share
Modal dasar - 20.000.000.000 saham				Authorized capital - 20,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 7.655.126.330 saham	20	765,512,633	765,512,633	Issued and paid-in capital - 7,655,126,330 shares
Tambahan modal disetor	21	257,963,521	257,963,521	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lainnya		2,895,126	2,895,126	Other equity component
Penghasilan komprehensif lain		(29,100,507)	(25,725,017)	Other comprehensive income
Saldo laba - sejak kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2004				Retained earnings - since quasi-reorganization on December 31, 2004
Ditentukan penggunaannya	22	11,000,000	11,000,000	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		1,824,441,573	1,735,791,342	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		2,832,712,346	2,747,437,605	Equity attributable to the Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	23	264,886,196	251,914,641	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		3,097,598,542	2,999,352,246	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		4,833,484,765	4,873,830,176	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. M ROPOLIT LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
31 MARET 2018 DAN 2017

PT. METROPOLITAN LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED
MARCH 31, 2018 AND 2017

	Catatan/ Notes	31 March/ March 31, 2018 Rp '000	31 March/ March 31, 2017 Rp '000	
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA	24,34	318,760,177	232,113,652	SALES AND REVENUES
BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN	25	137,161,069	92,225,371	DIRECT COSTS AND COST OF SALES
LABA BRUTO		181,599,108	139,888,281	GROSS PROFIT
Beban pemasaran	26	(20,905,239)	(17,918,105)	Marketing expenses
Beban administrasi	27	(46,109,019)	(40,869,034)	Administrative expenses
Bagian rugi ventura bersama	11	(2,291,428)	(801,066)	Share in net loss of joint venture
Beban pajak final	30	(14,926,067)	(11,918,452)	Final tax expense
Penghasilan bunga		5,002,971	2,955,826	Interest income
Beban keuangan	28	(15,179,103)	(18,003,476)	Finance cost
Keuntungan lain-lain - bersih	29	15,100,512	16,315,509	Other gains - net
LABA SEBELUM PAJAK		102,291,735	69,649,483	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK - BERSIH	31	(660,108)	179,471	TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		101,631,627	69,828,954	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK				OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF TAX
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(3,385,331)	(3,709,565)	Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss: Remeasurement of defined benefit obligation
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>98,246,296</u>	<u>66,119,389</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		88,650,231	65,339,465	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	23	12,981,396	4,489,489	Non-controlling interests
Jumlah		<u>101,631,627</u>	<u>69,828,954</u>	Total
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		85,274,741	61,637,301	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		12,971,555	4,482,088	Non-controlling interests
Jumlah		<u>98,246,296</u>	<u>66,119,389</u>	Total
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (Dalam Rupiah penuh)	32	11.58	8.54	BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE (Full amount in Rupiah)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT METROPOLITAN LAND Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES
 Lampiran - 1/1 - Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah)

	<u>2019</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	727,634	4	338,464	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha - pihak ketiga	105,227	5	163,676	<i>Trade receivables - third parties</i>
Piutang lain-lain				<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	29	26	29	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	113,793		21,689	<i>Third parties -</i>
Persediaan				<i>Inventories</i>
- Aset real estat	2,309,152	7	1,961,841	<i>Real estate assets -</i>
- Lain-lain	2,853		2,724	<i>Others -</i>
Aset keuangan lainnya	149,160	6	201,711	<i>Other financial assets</i>
Pajak dibayar dimuka	47,690	24	46,872	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	35,216		38,572	<i>Advances and prepaid expenses</i>
	<u>3,490,754</u>		<u>2,775,578</u>	
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang usaha - pihak ketiga jangka panjang	108,342	5	93,622	<i>Trade receivables - third parties long-term portion</i>
Piutang lain-lain - pihak ketiga jangka panjang	5,328		5,427	<i>Other receivables - third parties long-term portion</i>
Aset keuangan lainnya	158,453	6	149,029	<i>Other financial assets</i>
Persediaan - aset real estat	721,262	7	597,862	<i>Inventories - real estate assets</i>
Investasi ventura bersama	59,008	8	67,301	<i>Investments in joint venture</i>
Uang muka investasi ventura bersama	30,006	8	-	<i>Advance for investment in joint venture</i>
Aset pajak tangguhan	380		277	<i>Deferred tax assets</i>
Properti investasi	1,110,966	9	1,106,133	<i>Investment properties</i>
Aset tetap	385,178	10	366,198	<i>Fixed assets</i>
Aset tidak lancar lainnya	37,687		32,536	<i>Other non-current assets</i>
	<u>2,616,610</u>		<u>2,418,385</u>	
JUMLAH ASET	<u><u>6,107,364</u></u>		<u><u>5,193,963</u></u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT METROPOLITAN LAND Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES
 Lampiran - 1/2 - Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA				CURRENT LIABILITIES
PENDEK				<i>Short-term bank loans</i>
Utang bank jangka pendek	311,722	11	182,975	<i>Trade payables -</i>
Utang usaha - pihak ketiga	47,493		58,165	<i>third parties</i>
Utang lain-lain				<i>Other payables</i>
- Pihak berelasi	482	26	527	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	15,586		27,122	<i>Third parties -</i>
Utang pajak	53,732	24	38,470	<i>Taxes payable</i>
Beban akrual	180,838	13	51,884	<i>Accrued expenses</i>
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun	215,646	12	179,541	<i>Current maturities of long-term bank loans</i>
Pendapatan diterima dimuka dan uang muka pelanggan	<u>432,396</u>	14	<u>363,198</u>	<i>Unearned revenue and customer advances</i>
	<u>1,257,895</u>		<u>901,882</u>	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka panjang	855,780	12	701,341	<i>Long-term bank loans</i>
Pendapatan diterima dimuka dan uang muka pelanggan	39,170	14	55,685	<i>Unearned revenue and customer advances</i>
Uang jaminan pelanggan	34,842		35,380	<i>Customer deposits</i>
Liabilitas pajak tangguhan	3,865		3,627	<i>Deferred tax liabilities</i>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	<u>65,961</u>	15	<u>57,285</u>	<i>Employee benefit obligations</i>
	<u>999,618</u>		<u>853,318</u>	
JUMLAH LIABILITAS	<u><u>2,257,513</u></u>		<u><u>1,755,200</u></u>	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT METROPOLITAN LAND Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES
 Lampiran - 1/3 - Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah)

	<u>2019</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018</u>	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				<i>Equity attributable to owners of the parent</i>
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham (Rupiah penuh)				<i>Share capital - Rp 100 par value per share (full Rupiah)</i>
Modal dasar - 20.000.000.000 saham				<i>Authorised capital - 20,000,000,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.655.126.330 saham	765,513	16	765,513	<i>Issued and paid-in capital - 7,655,126,330 shares</i>
Tambahan modal disetor	257,964	16	257,964	<i>Additional paid-in capital</i>
Komponen ekuitas lainnya	2,895		2,895	<i>Other equity component</i>
Penghasilan komprehensif lain	(26,171)		(21,616)	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
- Dicadangkan	15,000	17	13,000	<i>Appropriated -</i>
- Belum dicadangkan	2,561,144		2,148,129	<i>Unappropriated -</i>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3,576,345		3,165,885	<i>Equity attributable to owners of the parent</i>
Kepentingan nonpengendali	273,506	18	272,878	<i>Non-controlling interests</i>
JUMLAH EKUITAS	<u>3,849,851</u>		<u>3,438,763</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>6,107,364</u>		<u>5,193,963</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT METROPOLITAN LAND Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES
 Lampiran - 2 - Schedule

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah)

	<u>2019</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018</u>	
Pendapatan	1,403,758	19	1,378,862	Revenues
Beban pokok pendapatan dan beban langsung	<u>(672,922)</u>	20	<u>(530,444)</u>	Cost of revenues and direct costs
Laba bruto	730,836		848,418	Gross profit
Beban pemasaran	(83,117)	21	(82,394)	<i>Marketing expenses</i>
Beban administrasi	(244,398)	22	(235,081)	<i>Administrative expenses</i>
Bagian rugi ventura bersama	(8,293)	8	(14,052)	<i>Share in net loss of joint venture</i>
Beban pajak final	(61,854)		(61,834)	<i>Final tax expense</i>
Penghasilan bunga	34,360		29,860	<i>Interest income</i>
Beban keuangan	(38,993)		(74,688)	<i>Finance cost</i>
Keuntungan lain-lain - neto	<u>161,921</u>	23	<u>98,071</u>	<i>Other gains - net</i>
Laba sebelum pajak penghasilan	490,462		508,300	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	<u>(2,840)</u>	24	<u>(1,072)</u>	<i>Income tax expense</i>
Laba tahun berjalan	<u>487,622</u>		<u>507,228</u>	Profit for the year
(Rugi)/laba komprehensif lain Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Other comprehensive (loss)/ income Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali imbalan kerja karyawan	(4,680)		4,416	<i>employee benefit obligations</i>
Pajak penghasilan terkait	<u>104</u>		<u>(292)</u>	<i>Related income tax</i>
(Rugi)/laba komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	<u>(4,576)</u>		<u>4,124</u>	<i>Other comprehensive (loss)/ income for the year, net of tax</i>
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	<u>483,046</u>		<u>511,352</u>	Total comprehensive income for the year
Laba yang diatribusikan kepada:				Profit attributable to:
Pemilik entitas induk	486,973		481,703	<i>Owner of the parent</i>
Kepentingan nonpengendali	<u>649</u>	18	<u>25,525</u>	<i>Non-controlling interest</i>
	<u>487,622</u>		<u>507,228</u>	
Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada:				Total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk	482,418		485,812	<i>Owner of the parent</i>
Kepentingan nonpengendali	<u>628</u>	18	<u>25,540</u>	<i>Non-controlling interest</i>
	<u>483,046</u>		<u>511,352</u>	
Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	63.62	25	62.93	<i>Basic earnings per share (full Rupiah)</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT METROPOLITAN LAND Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES
 Lampiran - 1/1 - Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019
 (Expressed in millions of Rupiah)

	<u>2020</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	492,110	4	727,634	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha				<i>Trade receivables</i>
- Pihak berelasi	90	26	-	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	134,982	5	105,227	<i>Third parties -</i>
Piutang lain-lain				<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	29	26	29	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	74,218		113,793	<i>Third parties -</i>
Persediaan				<i>Inventories</i>
- Aset real estat	2,329,676	6	2,309,152	<i>Real estate assets -</i>
- Lain-lain	2,724		2,853	<i>Others -</i>
Aset keuangan lainnya	104,607	7	149,160	<i>Other financial assets</i>
Pajak dibayar dimuka	39,096	24	47,690	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	51,319		35,216	<i>Advances and prepaid expenses</i>
	<u>3,228,851</u>		<u>3,490,754</u>	
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang usaha - pihak ketiga	81,173	5	108,342	<i>Trade receivables - third parties</i>
Piutang lain-lain - pihak ketiga	5,303		5,328	<i>Other receivables - third parties</i>
Uang muka pembelian tanah	5,040		-	<i>Advance for purchase of land</i>
Persediaan - aset real estat	764,079	6	721,262	<i>Inventories - real estate assets</i>
Aset keuangan lainnya	155,975	7	158,453	<i>Other financial assets</i>
Investasi ventura bersama	85,194	8	59,008	<i>Investments in joint venture</i>
Uang muka investasi ventura bersama	-	8	30,006	<i>Advance for investment in joint venture</i>
Aset pajak tangguhan	812		380	<i>Deferred tax assets</i>
Properti investasi	1,093,369	9	1,110,966	<i>Investment properties</i>
Aset tetap	492,362	10	385,178	<i>Fixed assets</i>
Aset tidak lancar lainnya	20,325		37,687	<i>Other non-current assets</i>
	<u>2,703,632</u>		<u>2,616,610</u>	
JUMLAH ASET	<u>5,932,483</u>		<u>6,107,364</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT METROPOLITAN LAND Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES
 Lampiran - 1/2 - Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019
 (Expressed in millions of Rupiah)

	<u>2020</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019¹⁾</u>	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA				
 PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	274,928	11	311,722	<i>Short-term bank loans</i>
Utang usaha - pihak ketiga	47,063		47,493	<i>Trade payables - third parties</i>
Utang lain-lain				<i>Other payables</i>
- Pihak berelasi	577	26	482	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	20,279		15,586	<i>Third parties -</i>
Utang pajak	29,185	24	53,732	<i>Taxes payable</i>
Beban akrual	147,394	13	180,838	<i>Accrued expenses</i>
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun	315,306	12	265,646	<i>Current maturities of long-term bank loans</i>
Pendapatan diterima dimuka dan uang muka pelanggan	390,792	14	432,396	<i>Unearned revenue and customer advances</i>
	<u>1,225,524</u>		<u>1,307,895</u>	
LIABILITAS JANGKA				
 PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka panjang	501,588	12	805,780	<i>Long-term bank loans</i>
Pendapatan diterima dimuka dan uang muka pelanggan	15,039	14	39,170	<i>Unearned revenue and customer advances</i>
Uang jaminan pelanggan	33,938		34,842	<i>Customer deposits</i>
Liabilitas pajak tangguhan	3,967		3,865	<i>Deferred tax liabilities</i>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	75,490	15	65,961	<i>Employee benefit obligations</i>
	<u>630,022</u>		<u>949,618</u>	
JUMLAH LIABILITAS	<u>1,855,546</u>		<u>2,257,513</u>	TOTAL LIABILITIES

¹⁾ Disajikan kembali, lihat Catatan 32

¹⁾ As restated, see Note 32

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT METROPOLITAN LAND Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES
 Lampiran - 1/3 - Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019
 (Expressed in millions of Rupiah)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				<i>Equity attributable to owners of the parent</i>
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham (Rupiah penuh)				<i>Share capital - Rp 100 par value per share (full Rupiah)</i>
Modal dasar - 20.000.000.000 saham				<i>Authorised capital - 20,000,000,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.655.126.330 saham	765,513	16	765,513	<i>Issued and paid-in capital - 7,655,126,330 shares</i>
Tambahan modal disetor	257,964	16	257,964	<i>Additional paid-in capital</i>
Komponen ekuitas lainnya	2,895		2,895	<i>Other equity component</i>
Penghasilan komprehensif lain	(33,102)		(26,171)	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
- Dicadangkan	17,000	17	15,000	<i>Appropriated -</i>
- Belum dicadangkan	2,779,191		2,561,144	<i>Unappropriated -</i>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3,789,461		3,576,345	<i>Equity attributable to owners of the parent</i>
Kepentingan nonpengendali	287,476	18	273,506	<i>Non-controlling interests</i>
JUMLAH EKUITAS	4,076,937		3,849,851	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5,932,483		6,107,364	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT METROPOLITAN LAND Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES
 Lampiran - 2 - Schedule

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019
 (Expressed in millions of Rupiah)

	2020	Catatan/ Notes	2019 ¹⁾	
Pendapatan	1,110,650	19	1,403,758	Revenues
Beban pokok pendapatan dan beban langsung	<u>(524,906)</u>	20	<u>(613,036)</u>	Cost of revenues and direct costs
Laba bruto	585,744		790,722	Gross profit
Beban pemasaran	(68,105)	21	(83,117)	Marketing expenses
Beban administrasi	(203,126)	22	(244,398)	Administrative expenses
Bagian rugi ventura bersama	(3,820)	8	(8,293)	Share in net loss of joint venture
Beban pajak final	(48,514)		(61,854)	Final tax expense
Penghasilan bunga	31,337		34,360	Interest income
Beban keuangan	(23,418)		(38,993)	Finance cost
Keuntungan lain-lain - bersih	<u>16,350</u>	23	<u>102,035</u>	Other gains - net
Laba sebelum pajak penghasilan	286,448		490,462	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	<u>(141)</u>	24	<u>(2,840)</u>	Income tax expense
Laba tahun berjalan	<u>286,307</u>		<u>487,622</u>	Profit for the year
Rugi komprehensif lain Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Other comprehensive loss Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali imbalan kerja karyawan	(7,231)		(4,680)	Remeasurement of employee benefit obligations
Pajak penghasilan terkait	<u>263</u>		<u>104</u>	Related income tax
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	<u>(6,968)</u>		<u>(4,576)</u>	Other comprehensive loss for the year, net of tax
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	<u>279,339</u>		<u>483,046</u>	Total comprehensive income for the year
Laba yang diatribusikan kepada:				Profit attributable to:
Pemilik entitas induk	272,299		486,973	Owner of the parent
Kepentingan nonpengendali	<u>14,008</u>	18	<u>649</u>	Non-controlling interest
	<u>286,307</u>		<u>487,622</u>	
Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada:				Total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk	265,368		482,418	Owner of the parent
Kepentingan nonpengendali	<u>13,971</u>	18	<u>628</u>	Non-controlling interest
	<u>279,339</u>		<u>483,046</u>	
Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	35.57	25	63.62	Basic earnings per share (full Rupiah)

¹⁾ Disajikan kembali, lihat Catatan 32

¹⁾ As restated, see Note 32

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.